

**ANALISIS KEBIJAKAN GUGATAN AFRIKA SELATAN TERHADAP
DUGAAN GENOSIDA ISRAEL DI MAHKAMAH INTERNASIONAL (ICJ)**

TAHUN 2023

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

ALIFFIA ISNAENI

22323028

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2026

**ANALISIS KEBIJAKAN GUGATAN AFRIKA SELATAN TERHADAP
DUGAAN GENOSIDA ISRAEL DI MAHKAMAH INTERNASIONAL (ICJ)**

TAHUN 2023

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

ALIFFIA ISNAENI

22323028

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2026

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS KEBIJAKAN GUGATAN AFRIKA SELATAN TERHADAP
DUGAAN GENOSIDA ISRAEL DI MAHKAMAH INTERNASIONAL
(ICJ) TAHUN 2023**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional
Pada Tanggal



Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



Dewan Penguji

- 1 Khairul Munzilin, S.IP., M.A.
- 2 Alfredha Shinta Putri, S.IP., M.H.I.
- 3 Enggar Furi Herdianto, S.I.P., M.A.

Tanda Tangan

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR.....	iii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	iv
ABSTRAK	v
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Cakupan Penelitian	4
1.5 Tinjauan Pustaka.....	5
1.6 Kerangka Pemikiran	8
1.7 Argumen Sementara	11
1.8 Metode Penelitian	11
1.8.1 Jenis Penelitian.....	11
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian.....	12
1.8.3 Metode Pengumpulan Data	12
1.8.4 Proses Penelitian.....	13
1.9 Sistematika Pembahasan	13
BAB II	14
DINAMIKA MENGENAI GUGATAN AFRIKA SELATAN TERHADAP	
ISRAEL DI MAHKAMAH INTERNASIONAL (ICJ).....	14
2.1 Hubungan Afrika Selatan dan Israel-Palestina	14
2.2 Upaya Afrika Selatan dalam Forum Internasional ICJ.....	17
2.3 Faktor Afrika Selatan Menggugat Israel ke ICJ	19
BAB III.....	22
ANALISIS PERAN AFRIKA SELATAN DALAM PENYELESAIAN	
KONFLIK ISRAEL - PALESTINA.....	22
3.1 Role Conception.....	22
3.2 Role Expectation	26
3.3 Role Enactment	32
BAB IV	35
PENUTUP	35

4.1 Kesimpulan.....	35
4.2 Rekomendasi	36
DAFTAR PUSTAKA.....	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Proses Pembentukan Identitas dan Peran dalam *Role Theory*

10

Pernyataan Integritas Akademik

Dengan ini saya menyatakan bahwa proposal skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 29 Juli 2025



Aliffia Isnaeni

ABSTRAK

Penelitian ini berisi analisis mengenai faktor atau motif apa yang membuat Afrika Selatan menggugat Israel di mahkamah internasional (ICJ) atas dugaan genosida terhadap Palestina pada tahun 2023 padahal seperti yang kita ketahui Afrika Selatan ini bukan merupakan negara muslim tetapi mereka sangat vokal menyuarakan keadilan bagi Palestina. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum apa yang Afrika Selatan gunakan untuk menggugat Israel serta mengapa Afrika Selatan memilih jalur hukum dalam mengatasi konflik Palestina-Israel. Lalu, penulisan ini ditulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif seperti melalui sumber-sumber seperti jurnal akademik dan berita. Kemudian dalam menganalisis penulis menggunakan *Role Theory* oleh Sebastian Harnisch, Cornelia Frank, dan Hanns W. Maull (2011). Hasil penelitian yang didapatkan menunjukkan bahwa faktor yang membuat Afrika Selatan menggugat Israel ke ICJ dikarenakan adanya kesamaan identitas kolektif antara Afrika Selatan dan Palestina serta adanya ekspektasi dari kelompok internasional. Sehingga, karena rasa persamaan nasib dan tekanan tersebutlah membuat Afrika Selatan perlu untuk membantu Palestina. Kemudian, motif yang membuat Afrika Selatan memilih jalur hukum melalui ICJ dikarenakan Afrika Selatan yang masih merupakan negara berkembang melawan negara barat yakni Israel dan sekutunya Amerika. Tidak hanya itu, ternyata Afrika Selatan juga ingin membuktikan efektivitas dari lembaga-lembaga internasional salah satunya mahkamah internasional ICJ.

Kata kunci: Mahkamah internasional (ICJ), Afrika Selatan, Israel, Genosida, Anti-apartheid.

ABSTRACT

This research contains an analysis of the factors or motives that led South Africa to sue Israel at the International Court of Justice (ICJ) for alleged genocide against Palestine in 2023, even though, as we know, South Africa is not a Muslim country but they are very vocal in voicing justice for Palestine. In addition, this research aims to determine what legal basis South Africa uses to sue Israel and why South Africa chose legal channels in resolving the Palestine-Israel conflict. Then, this paper was written using a qualitative method with a descriptive approach such as through sources such as academic journals and news. Then in analyzing the author uses Role Theory by Sebastian Harnisch, Cornelia Frank, dan Hanns W. Maull (2011). The results of the research obtained show that the factors that led South Africa to sue Israel at the International Court of Justice (ICJ) were due to the shared collective identity between South Africa and Palestine and the expectations of international groups. Thus, because of the sense of shared fate and pressure, South Africa needs to help Palestine. Then, the motive that led South Africa to choose legal channels through the International

Court of Justice (ICJ) was because South Africa was still a developing country against a western country, namely Israel and its ally, America. Furthermore, South Africa also sought to demonstrate the effectiveness of international institutions, including the International Court of Justice (ICJ).

Keywords: International Court of Justice (ICJ), South Africa, Israel, Genocide, Anti-apartheid

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran Afrika Selatan dalam gugatan terhadap Israel di Mahkamah Internasional (ICJ) pasca serangan Hamas 7 Oktober 2023. Yang mana, serangan yang diluncurkan oleh Hamas atau yang dikenal sebagai Operasi Badai Al-Aqsa ini bertujuan untuk mengambil kembali dan memperjuangkan hak-hak yang seharusnya menjadi milik Palestina dari Israel (Aidini and Hidayatullah 2025). Selain itu, menurut Mohammad Deif Komandan Militer Hamas penyerangan terhadap Israel ini merupakan respon atau balasan atas blokade yang telah dilakukan Israel selama 17 tahun lamanya (Adryamarthanino and Indriawati 2023). Tetapi, tidak lama setelah serangan yang diluncurkan oleh Hamas pada 7 Oktober 2023, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu langsung menyiapkan pasukannya sebanyak mungkin dan menyatakan negara dalam kondisi perang dengan Hamas. Alhasil, perang tersebut hingga saat ini 2025 menewaskan masyarakat Gaza sebanyak 46.913 dan 110.750 luka-luka (Fadhil 2025).

Selain menargetkan masyarakat sipil di Gaza, Israel juga menyasar infrastruktur seperti rumah sakit, sekolah, pemukiman warga, dll. Sehingga, aksi penyerangan yang dilakukan oleh Israel ini menimbulkan pertanyaan terutama mengenai kepatuhannya terhadap Konvensi Genosida 1948. Konvensi Genosida ini merupakan perjanjian internasional yang disahkan oleh PBB pada 9 Desember 1948

guna mencegah terulangnya genosida di masa depan, menghukum pelaku genosida dan pelaku kejahatan manusia, serta melindungi hak asasi manusia (Rani 2024).

Ciri-ciri bahwa suatu negara telah melakukan tindakan genosida dalam hukum internasional yakni: 1). Membunuh anggota kelompok, 2). Mengakibatkan kerugian fisik atau mental yang serius kepada anggota kelompok, 3). Sengaja membuat kondisi kehidupan yang dapat menyebabkan kemusnahan fisik secara keseluruhan maupun sebagian anggota kelompok, 4). Melakukan berbagai tindakan untuk mencegah kelahiran di dalam suatu kelompok, 5). Memindahkan anak-anak secara paksa dari kelompok tertentu ke kelompok lain (Hassanah 2017). Sehingga, bisa dikatakan bahwa penyerangan yang dilakukan Israel terhadap Palestina selama ini merupakan tindakan genosida karena telah memenuhi 5 indikator diatas.

Melihat adanya berbagai tindakan genosida yang dilakukan Israel terhadap Palestina diatas memunculkan banyak reaksi dari berbagai negara salah satunya Afrika Selatan yang menuntut tindakan genosida Israel ke Mahkamah Internasional atau ICJ (*International Court of Justice*) pada 29 Desember 2023. Tindakan yang dilakukan Afrika Selatan ini disebabkan karena adanya kesamaan historis Afrika Selatan yang sama-sama pernah mengalami penindasan dari sistem Apartheid pada 1948 sehingga melihat adanya konflik Israel-Palestina maka Afrika Selatan perlu untuk membantu Palestina. Selain karena adanya kesamaan historis aksi Afrika Selatan disebabkan karena kedekatan antara *African National Congress* (ANC) dan *Palestinian Liberalisation Organization* (PLO) yang dimulai sejak adanya peristiwa Soweto Uprising pada 1970 (Pontarelli 2024).

Pasal yang diajukan oleh Afrika Selatan yakni Pasal I dan IV Konvensi Genosida 1948. Pasal ini diajukan karena dalam isinya mengatakan bahwa seharusnya negara wajib untuk tidak melakukan genosida, mencegah genosida, serta menghukum pelaku genosida. Sehingga, Afrika Selatan mengajukan permohonan Provisional Measures (tindakan sementara) kepada ICJ untuk menghentikan aktivitas militer Israel guna meminimalisir kerusakan di Palestina (Zahro 2025). Tetapi, Israel malah membantah gugatan tersebut dengan berlandaskan Pasal 51 Piagam PBB yang berisi bahwa setiap negara mempunyai hak untuk membela diri dari serangan bersenjata. Sehingga, penyerangan Israel terhadap Palestina pada 7 Oktober 2023 itu merupakan bentuk tindakan melindungi negara atau *self defense* (Setiawan 2024).

Menariknya, hubungan antara Afrika Selatan dengan Israel sekarang berbanding terbalik dengan hubungan mereka pada masa lalu. Kedekatan mereka disebabkan karena ketika apartheid sedang berlangsung Afrika Selatan dan Israel tengah mengalami isolasi diplomatik sehingga mereka mulai menjadi mitra strategis. Tetapi, hubungan mereka berakhir dikarenakan adanya transformasi kebijakan Afrika Selatan yang awalnya berlandaskan sistem apartheid menjadi sistem kebijakan yang berasaskan hak asasi manusia, *anti colonial solidarity*, dan *african nationalism* (Alaia, Reni, and Arief 2025). Sehingga, sejak itulah Afrika Selatan mulai mengkritik kebijakan Israel secara terbuka, menarik seluruh duta besar yang ada di Israel, dan mendukung gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS).

Maka dari itu, berdasarkan latar belakang diatas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Afrika Selatan dalam mengajukan gugatan terhadap Israel di ICJ. Sehingga, penulis melihat bahwa tulisan ini cocok dianalisis

menggunakan Role Theory oleh Sebastian Harnisch, Cornelia Frank, dan Hanns W. Maull (2011) yang mana teori ini menekankan bahwa posisi sosial suatu negara terbentuk dari bagaimana suatu negara memahami diri mereka serta bagaimana negara lain berekspektasi terhadap mereka.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana peran Afrika Selatan dalam menggugat Israel ke Mahkamah Internasional (ICJ)?

1.3 Tujuan Penelitian

Riset ini memiliki tujuan yakni untuk mengetahui bagaimana peran Afrika Selatan terbentuk dalam upaya penyelesaian konflik Israel-Palestina. Selain itu, penulisan ini bertujuan untuk mengetahui alasan mengapa Afrika Selatan memilih jalur hukum internasional untuk menggugat Israel.

1.4 Cakupan Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada rentang waktu Desember 2023 hingga Juli 2026 ketika penelitian ini masih disusun. Periode tersebut dipilih karena Desember 2023 merupakan waktu Afrika Selatan resmi menggugat Israel dan 2026 merupakan perkembangan terakhir yang tersedia ketika penelitian ini disusun. Lalu, batasan ini dipilih karena fokus penelitian ini untuk menganalisis bagaimana proses kebijakan Afrika Selatan terbentuk hingga akhirnya menggugat Israel ke ICJ. Selanjutnya, penelitian ini berfokus pada Afrika Selatan sebagai aktor negara dan wilayah yang

menjadi latar belakang gugatan yang diajukan Afrika Selatan adalah Palestina. Kemudian, penelitian akan dianalisis menggunakan *Role Theory* oleh Sebastian Harnisch, Cornelia Frank, dan Hanns W. Maull (2011) yang mana teori ini menekankan bahwa persepsi suatu aktor terhadap dirinya dan ekspektasi dari aktor lain berperan dalam membentuk posisi sosial mereka di sistem internasional yang kemudian nantinya dapat mempengaruhi peran suatu aktor.

1.5 Tinjauan Pustaka

Untuk memahami gugatan Afrika Selatan terhadap Israel di ICJ diperlukan beberapa kajian literatur yang relevan. Maka dari itu, pada penelitian ini peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang akan digunakan sebagai referensi penelitian ini guna memperkuat hasil penelitian penulis. Karena, penelitian-penelitian terdahulu memberikan berbagai perspektif terhadap isu ini. Dengan mengkaji beberapa penelitian terdahulu diharapkan penulis menemukan research puzzle dan memberikan landasan bagi analisis ini. Untuk menganalisis gugatan Afrika Selatan terhadap dugaan genosida Israel di ICJ mengklasifikasikan pembahasan dari penelitian terdahulu menjadi tiga pembahasan yakni: 1). Sektor politik internasional, 2). Sektor kebijakan luar negeri, dan 3). Diplomasi negara *global south*

Pembahasan pertama yakni dari sektor politik internasional yang diambil dari penelitian yang berjudul “Peran Afrika Selatan dalam Mendorong ICJ pada Manajemen Konflik Israel-Palestina Melalui Lensa Konstruktivisme” oleh Rahma Azizah. Pada jurnal tersebut dijelaskan bahwa tujuan Afrika Selatan mendukung Palestina yakni karena ingin mewujudkan perdamaian dan keadilan di Timur Tengah.

Kemudian, dalam penggunaan diplomasi yang dilakukan oleh Afrika Selatan dalam upaya memperjuangkan Palestina yakni dengan membangun narasi yang mengaitkan perjuangan Palestina dengan nilai-nilai universal seperti keadilan, kesetaraan, dan hak asasi manusia dalam forum-forum internasional seperti PBB (Azizah, 2025). Karena, dengan mengedepankan nilai-nilai universal dapat menunjukkan konsistensi Afrika Selatan dalam memperjuangkan tatanan global yang inklusif. Kemudian, pada jurnal yang berjudul “Kepentingan Afrika Selatan Dalam Gugatan Pelanggaran Konvensi Genosida Pada Konflik Israel Palestina 2023-2024” oleh Salsabila Ratu Buana Khan. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa Afrika Selatan ini dalam politik internasional cenderung dekat dengan negara musuh Amerika (China, Rusia, dan Iran) apalagi Afrika Selatan bergabung dalam BRICKS bersama China dan Rusia. Maka dari itu, untuk menunjukkan perannya sebagai anggota ketua BRICKS Afrika Selatan mulai berani untuk menggugat Israel ke mahkamah internasional (Khan, 2024).

Pembahasan kedua yakni mengenai sektor kebijakan luar negeri yang mana pada jurnal artikel yang berjudul “*Human Rights and Foreign Policy: South Africa’s Genocide Complaint Against Israel at the International Court of Justice*” oleh Penelope Andrews. Dalam jurnal tersebut beliau membahas mengenai peran hak asasi manusia dalam kebijakan luar negeri Afrika Selatan. Lalu, dalam isinya beliau menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri Afrika Selatan secara retorik didorong oleh hak asasi manusia dan hal tersebut dimulai sejak era pasca apartheid yang kemudian sejak saat itu hak asasi manusia menjadi branding diplomasi Afrika Selatan. Tetapi, disisi lain pada praktiknya kebijakan luar negeri Afrika Selatan didorong oleh kepentingan politik dan oportunisme. Selain itu, kebijakan luar negeri Afrika Selatan

tidak terlepas dari sejarah *African National Congress (ANC)* serta hubungan politik dengan sekutunya. Misalnya, ANC pada era apartheid diberi dukungan dari negara-negara yang pro Palestina sehingga ketika era Apartheid berakhir Afrika Selatan perlu balas budi sehingga dukungannya terhadap Palestina bukan sepenuhnya karena hak asasi manusia melainkan juga karena untuk menjaga hubungan politik dengan negara sekutunya (Andrews 2025).

Pembahasan sektor ketiga mengenai diplomasi negara *global south*. Dalam jurnal yang berjudul “*Israel/Palestine and the Normative Power of the Global South*” oleh Daniela Huber menjelaskan bahwa berbagai negara-negara selatan mulai mengambil inisiatif di berbagai lembaga-lembaga internasional seperti PBB dan ICJ. Hal ini dapat dilihat bahwa Afrika Selatan telah mengajukan gugatan terhadap Israel ke ICJ atas dugaan pelanggaran terhadap warga Palestina. Kemudian, aksi Afrika Selatan tersebut melihatkan kepemimpinan negaranya yang mengesankan selain itu Afrika Selatan juga membuka jalan bagi negara Selatan lainnya untuk menyuarakan keadilan bagi Palestina. Selanjutnya, dalam jurnal tersebut mengatakan bahwa dengan adanya krisis kemanusiaan yang ada di Palestina ini dapat mempengaruhi legitimasi negara-negara barat dalam tatanan global dunia sehingga kualitas moral negara-negara Barat ini perlu dipertanyakan. Maka dari itu, jika negara-negara barat ingin mempertahankan legitimasinya maka mereka harus patuh terhadap prinsip-prinsip hukum internasional dan dalam kasus ini negara-negara barat seharusnya tidak hanya diam ataupun mendukung Israel atas pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukannya (Huber 2024).

Kemudian, pada jurnal berjudul “*A Panoramic View Of South Africa’s Case At The International Court Of Justice*” oleh Archama Siddiqi membahas mengenai respon global atas gugatan yang diajukan Afrika Selatan terhadap Israel di ICJ dan negara-negara atau organisasi yang mendukung tindakan Afrika Selatan diantaranya ada *Organization of Islamic Cooperation* (OIC). Hal tersebut dibuktikan dengan salah satu anggota negara OIC membantah tuduhan Israel yang menyatakan bahwa Kairo memblokade bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza melalui perbatasan Rafah. Selain itu, dukungan juga datang dari negara Turki yang mana hal ini dibuktikan dengan Turki mengirimkan dokumen ke *The Hague* untuk menguatkan tuduhan Afrika Selatan bahwa Israel telah melakukan genosida kepada Palestina. Lalu, ada negara Pakistan yang mendukung tindakan Afrika Selatan tersebut dengan segera menyerukan gencatan senjata tanpa syarat, mendesak penghentian genosida, hingga menyediakan bantuan kemanusiaan (Sidiqqa 2024).

Dari keempat pembahasan artikel tersebut menunjukkan bahwa konflik genosida yang dilakukan Israel terhadap Palestina sudah ada yang mengkaji dari sektor politik internasional, kebijakan luar negeri, dan diplomasi negara *global south*. Kemudian, penelitian diatas belum ada yang berfokus membahas mengenai mengapa Afrika Selatan dalam pembuatan kebijakan luar negerinya memilih berani untuk menggugat Israel ke mahkamah internasional. Padahal, Israel merupakan negara yang memiliki support system dari negara-negara berpower seperti Amerika dan Uni Eropa. Sehingga, research puzzle dari penulisan ini yakni mengapa Afrika Selatan memilih jalur hukum untuk menggugat kasus dugaan genosida yang dilakukan Israel terhadap Palestina.

1.6 Kerangka Pemikiran

Untuk memahami keputusan Afrika Selatan yang menggugat Israel atas dugaan genosida terhadap Palestina di ICJ penulis menggunakan *Role Theory* oleh Sebastian Harnisch, Cornelia Frank, dan Hanns W. Maull (2011). *Role* (peran) menurut Sebastian Harnisch yakni merupakan posisi sosial suatu negara yang terbentuk dari bagaimana mereka memandang dirinya dan ekspektasi dari aktor lain. Yang mana, posisi sosial suatu negara dapat menentukan peran yang akan diambil (Harnisch, Frank, and Maull 2011). Lalu, terdapat tiga fungsi dari teori ini yang digunakan untuk menjelaskan proses kebijakan Afrika Selatan dibentuk.

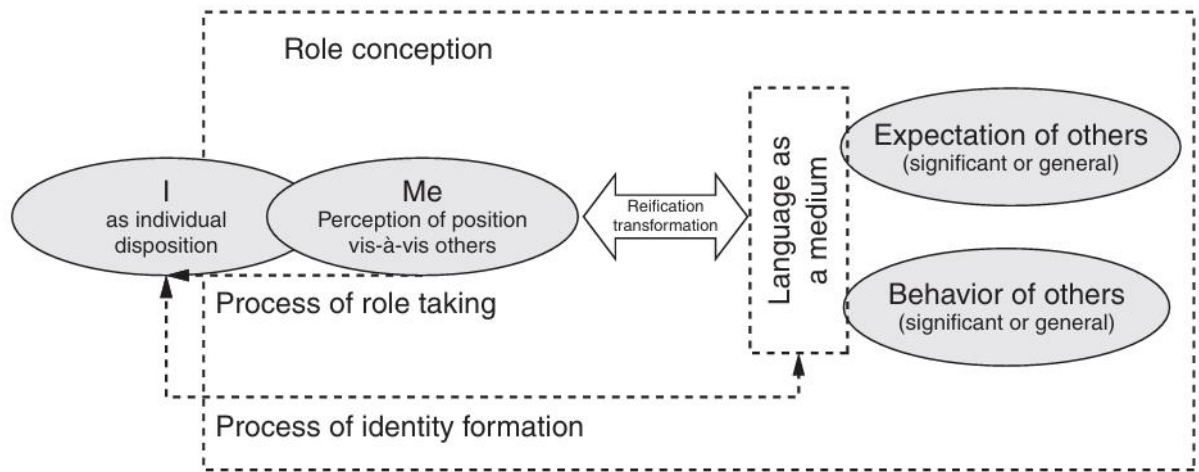
Pertama, *Role Conceptions* yang merupakan persepsi suatu aktor mengenai identitas sosialnya atau bagaimana suatu negara melihat atau memposisikan dirinya. Pada elemen ini pembentukan atau pelaksanaan peran suatu negara tidak lepas dari pengaruh peran aktor lain. Hal ini, menyebabkan jika aktor lain terlalu dominan dalam pembuatan kebijakan suatu negara maka nantinya aktor lain tersebut dapat mengambil alih peran negara tersebut sehingga membuat kebijakan suatu negara tidak sesuai dengan kepentingan atau identitas mereka sendiri. Maka dari itu, pembentukan identitas atau peran tidak sepenuhnya terbentuk secara mandiri melainkan dapat dipengaruhi oleh ekspektasi atau tekanan dominasi aktor lain (Harnisch 2010).

Kedua, *Role Expectation* merupakan ekspektasi atau harapan yang diharapkan aktor lain terhadap suatu negara. Kemudian, ekspektasi dari aktor seperti negara atau organisasi internasional sangat bervariasi karena di satu sisi peran tersebut dibentuk dari dua hal yakni *ego* atau harapan dari aktor tersebut atau bagaimana mereka melihat

dan memposisikan dirinya dan *alter* yang maknanya ekspektasi dan tuntutan dari aktor lain mengenai tindakan apa yang sebaiknya mereka lakukan. Tetapi, karena ekspektasi yang bermacam-macam dari aktor lain dapat menyebabkan konflik bagi para negara maupun organisasi internasional (Harnisch 2010).

Ketiga, *Role Enactment* merupakan tindakan nyata dan penentu esensial dalam pembentukan identitas dan mewujudkan peran. Karena, elemen ini mengacu pada perilaku aktor ketika sedang memainkan suatu peran dan jika aktor tersebut tidak berhasil dalam mewujudkan suatu peran maka dapat memberikan dampak pada proses pembentukan identitas atau identifikasi diri. Kemudian, jumlah peran yang dilakukan oleh aktor tersebut dapat meningkatkan kemampuan sosial aktor untuk berinteraksi dan memperluas relasi dengan kelompok lainnya. Tetapi, justru semakin banyak jumlah peran yang ditunjukkan seorang aktor malah membuat identitas aktor tersebut beragam dan tidak terfokus dalam satu peran. Sehingga, sedikit jumlah peran yang ditunjukan seorang aktor maka semakin besar kemungkinan peran tersebut membentuk identitas nya (Harnisch 2010).

Gambar 1: Proses Pembentukan Identitas dan Peran dalam *Role Theory*



Sumber: Role Theory in International Relations (2011)

Gambar diatas menjelaskan “I” yang merupakan persepsi yang berasal dari dalam diri aktor itu sendiri sedangkan “Me” merupakan persepsi aktor terhadap diri sendiri yang berdasarkan harapan dari aktor lain yang mana dua komponen tersebut kemudian terbentuklah *role conception*. Konsepsi aktor tersebut kemudian diutarakan ke aktor lain melalui “*Language as a medium*” yang kemudian suatu negara dapat memahami *role expectation* atau harapan dari aktor lain. Kemudian, terdapat dua asal harapan itu datang yakni dari “*Expectation of others*” atau harapan yang diberikan secara langsung seperti pernyataan resmi dan “*Behaviour of others*” atau harapan yang datang dari aksi nyata misal banyak negara yang mendukung gugatan Afrika Selatan terhadap Israel.

Sehingga, dari gambar diatas dapat disimpulkan bahwa *role conception* terbentuk dari hubungan antara persepsi suatu negara terhadap dirinya dan bagaimana

negara tersebut menerima ekspektasi dari aktor lain yang kemudian kedua hal tersebut nantinya akan mempengaruhi aksi nyata dalam pengambilan kebijakan luar negerinya. Selain itu, gambar diatas juga menjelaskan bahwa identitas yang dimiliki suatu negara itu tidak lahir secara alamiah melainkan karena adanya interaksi sosial terus menerus. Maka dari itu, teori ini tepat untuk menganalisis mengenai proses pengambilan kebijakan Afrika Selatan menggugat Israel ke ICJ. Hal ini, dikarenakan adanya persepsi Afrika Selatan yang melihat dirinya sebagai anti-penjajahan dan menjunjung tinggi HAM serta adanya ekspektasi negara *global south* ataupun komunitas internasional yang berharap Afrika Selatan dapat mengatasi dan melakukan aksi nyata atas kejahatan Israel terhadap palestina. Sehingga, dengan adanya ekspektasi tersebut Afrika Selatan mengambil *role enactment* atau aksi nyata dengan menggugat Israel ke ICJ.

1.7 Argumen Sementara

Dapat disimpulkan sementara bahwa *role conception* Afrika Selatan yang melihat dirinya sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, anti penjajahan, dan anti diskriminasi terbentuk dari sistem apartheid Afrika Selatan pada 1948. Kemudian, dengan adanya kesamaan historis antara Afrika Selatan dan Palestina yang mana Afrika Selatan pernah mengalami sistem apartheid dan Palestina pernah mengalami peristiwa Nakba memicu adanya *role expectation* atau harapan dari berbagai aktor yang mendorong Afrika Selatan agar dapat menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Sehingga, ekspektasi-ekspektasi yang diterima Afrika Selatan

kemudian diwujudkan melalui aksi nyata atau *role enactment* yaitu dengan Afrika Selatan menggugat Israel atas dugaan genosida terhadap Palestina ke ICJ.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif karena dinilai relevan untuk menjelaskan permasalahan yang ada metode ini sering digunakan dalam menulis di bidang hubungan internasional. Kemudian, pendekatan deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kebijakan yang diambil Afrika Selatan berdasarkan sumber-sumber seperti jurnal akademik dan berita. Lalu, menurut Bogdan dan Taylor mengatakan bahwa metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berbentuk tertulis maupun lisan dari perilaku yang diamati. Dengan demikian, penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif untuk membantu menggali secara mendalam mulai dari latar belakang atau faktor yang membuat Afrika Selatan menggugat Israel ke mahkamah internasional hingga motif atau kepentingan Afrika Selatan dalam menggugat Israel.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Afrika Selatan yang menjadi negara penggugat ke mahkamah internasional. Kemudian, di sisi lain objek pada penelitian ini

yakni kebijakan Afrika Selatan menggugat Israel atas dugaan genosida di mahkamah internasional (ICJ).

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis yakni dengan mengumpulkan sumber sekunder dengan menggunakan jurnal akademik, berita, buku, dan website. Data sekunder menurut DR. Muhammad Alkirom Wildan merupakan sumber data penelitian yang didapatkan secara tidak langsung dan data sekunder biasanya digunakan sebagai pendukung data primer (Wildan, n.d.). Lalu, alasan peneliti menggunakan sumber sekunder yakni karena paling banyak digunakan dalam menulis tugas akhir di jurusan Hubungan Internasional. Selain itu, data sekunder lebih mudah dan cepat didapatkan karena sudah banyak yang menyediakan seperti di perpustakaan hingga di internet.

1.8.4 Proses Penelitian

Terdapat tiga tahapan yang akan dilakukan dalam penelitian ini diantaranya yang pertama, studi literatur yang mana tahapan ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan menganalisis temuan, konsep, serta argumen dari penelitian terdahulu. Sehingga, peneliti dapat mengidentifikasi research puzzle dari penelitian ini dan dapat memperkuat argumen penelitian penulis. Kedua, perumusan masalah yang mana pada tahap ini setelah menentukan apa isu yang akan dibahas peneliti mulai menentukan rumusan masalah dan tujuan dari penelitian ini. Ketiga, mengumpulkan dan menganalisis data dari sumber-sumber data sekunder seperti jurnal akademik, berita,

website yang nantinya akan dianalisis sesuai teori atau konsep yang telah ditentukan,

4). Membuat kesimpulan serta menjawab rumusan masalah dari penelitian ini.

1.9 Sistematika Pembahasan

Pada penulisan penelitian ini dapat dipaparkan dalam sistematika seperti berikut:

BAB I Pada bab ini akan menjelaskan pendahuluan mulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, argumen sementara, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II Pada bab ini penulis akan membahas mengenai dinamika gugatan Afrika Selatan di ICJ.

BAB III Pada bab ini penulis akan menganalisis peran Afrika Selatan dalam konflik Israel-Palestina.

BAB IV Pada bab ini penulis akan menuliskan kesimpulan yang diambil dari penelitian ini.

BAB II

DINAMIKA MENGENAI GUGATAN AFRIKA SELATAN TERHADAP ISRAEL DI MAHKAMAH INTERNASIONAL (ICJ)

2.1 Hubungan Afrika Selatan dan Israel-Palestina

Hubungan Afrika Selatan dan Israel telah mengalami transisi dari yang awalnya dekat berubah menjadi musuh. Kemudian, karena transisi hubungan tersebut menyebabkan pergeseran kebijakan luar negeri Afrika Selatan terhadap Israel yang dulunya pernah bekerja sama sekarang Afrika Selatan telah memutus segala kerjasamanya dengan Israel. Sehingga, guna memahami kebijakan luar negeri Afrika Selatan yang menggugat Israel ke mahkamah internasional maka kita perlu mengetahui mengenai hubungan kedua negara ini mulai dari sebelum era apartheid hingga pasca apartheid.

Ketika era apartheid Afrika Selatan pada tahun (1948-1994) dibawah kepemimpinan Field Marshal Jan Smuts memiliki hubungan yang dekat dengan Israel dan hal ini bisa dilihat ketika pada 1949 Afrika Selatan secara resmi mengakui adanya negara israel. Yang mana, kedua hubungan negara ini berakar dari adanya *shared strategic* dan *ideological interest* yang maknanya pada masa itu Afrika Selatan dan Israel tengah menghadapi isolasi diplomatik karena kebijakan apartheid Afrika Selatan dan penolakan diplomatik Israel karena konflik pendudukan wilayah Palestina sehingga kedua negara ini merasa adanya kesamaan nasib dan mulailah menjadi mitra strategis. Tetapi, hubungan kedua negara ini berubah drastis ketika era apartheid ini

runtuh tepatnya pada tahun 1994 ketika *African National Congress* (ANC) dibawah kepemimpinan Nelson Mandela memperkenalkan sebuah kebijakan luar negeri baru yang berasaskan hak asasi manusia, *anti-colonial solidarity*, dan african nationalism. Sehingga, hal tersebut merupakan sebuah evolusi bagi Afrika Selatan yang dulunya merupakan aliansi bersama Israel menjadi musuh karena adanya kebijakan luar negerinya yang baru (Alaia, Reni, and Arief 2025).

Akar dari sejarah hubungan antara Afrika Selatan dan Palestina itu dimulai pada awal 1970 ketika 800 siswa terbunuh di Soweto, Afrika Selatan yang terjadi karena protes pelajar terhadap sistem pendidikan apartheid (*Soweto Uprising*). Sehingga, banyak anak-anak muda disana meninggalkan Afrika Selatan untuk belajar atau bergabung dengan *liberation movements*. Mulai dari situlah organisasi Palestina seperti *Palestine Liberation Organization* (PLO) memainkan peran penting karena sebagian anak-anak muda kulit hitam Afrika Selatan yang melarikan diri dari Afrika Selatan bergabung dalam pelatihan dari PLO. Lalu, karena adanya perasaan kesamaan historis sehingga peristiwa tersebut menyebabkan PLO dan ANC bekerjasama memberikan pelatihan untuk misi pembebasan apartheid (Pontarelli 2024).

Melihat konflik yang sedang dialami Palestina pada masa itu yang sedang mengalami penjajahan oleh Israel Maka Afrika Selatan yang merasa adanya persamaan historis kemudian perlu untuk membantu pembebasan Palestina dan beberapa kontribusi yang telah dilakukan Afrika Selatan terhadap Palestina sebelum 2023 yakni yang pertama, Afrika Selatan pasca apartheid berakhir pada 1994 selalu konsisten menentang Israel dalam pemungutan suara di PBB. Hal ini dikarenakan Afrika Selatan menganggap Israel telah melakukan aksi yang berbentuk genosida seperti

penghancuran dan pembersihan sebagian besar kelompok, ras, dan etnis Palestina yang mana aksi tersebut merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia dan tindakan ilegal menurut hukum internasional seperti konvensi genosida 1948 (Akbar and Genoves 2024). Sehingga, dengan selalu konsisten memberi suara menentang Israel di PBB berupaya membuat Israel melemah.

Kedua, Afrika selatan berkontribusi besar dalam upaya Palestina mendapatkan status tetap di PBB. Meskipun, Palestina ini telah memenuhi kriteria untuk menjadi keanggotaan penuh PBB tetapi karena adanya kekuatan hak veto terutama dari AS dan biasanya sistem internasional sangat disayangkan karena ketika resolusi mengenai penghentian gencatan senjata di Palestina oleh Israel telah disetujui oleh sebanyak 14 dari 15 anggota dewan keamanan tetapi karena AS dengan keistimewaan hak vetonya malah menolak resolusi tersebut sehingga menyebabkan resolusi ini gagal tercapai (Nursanty 2025).

Ketiga, Afrika Selatan vokal mengkritik kebijakan Israel. Contoh beberapa kebijakan yang telah dikritik oleh Afrika Selatan diantaranya yakni kebijakan blokade atau penutupan akses bantuan kemanusiaan seperti makanan dan kesehatan untuk masuk ke jalur Gaza oleh Israel. Kebijakan ini dikritik karena penutupan atau penghentian masuknya bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza sudah termasuk tindakan genosida dan melanggar perjanjian gencatan senjata, hukum humaniter internasional, dan Konvensi Jenewa. Selanjutnya, kebijakan yang dikritik yakni kebijakan pembangunan pemukiman ilegal Israel di tepi barat dan perubahan status kota Yerusalem. Kebijakan ini dikritik dan tidak sah menurut hukum internasional karena jika mengacu pada pasal 49 Konvensi Jenewa disana telah disebutkan bahwa “Negara

pendudukan tidak boleh memindahkan warga sipilnya ke wilayah negara yang sedang didudukinya”. Sehingga, kedua kebijakan Israel tidak sah dan apabila tetap dijalankan akan menjadi kejahatan internasional (Callista, Lysandra, and Tiffany 2024).

Keempat, Afrika Selatan mendukung penuh aksi legal The *International Criminal Court* (ICC) untuk menyelidiki genosida yang dilakukan Israel terhadap Palestina. Yang mana, ICC ini telah menyelidiki genosida yang dilakukan Israel terhadap Palestina sejak Maret 2021. Lalu, ketika terjadinya serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 ICC bertindak cepat dengan mengeluarkan surat perintah penangkapan perdana menteri Israel Benjamin Netanyahu dan menteri pertahanan Israel Yoav Galant pada November 2024. Namun sayangnya, karena ICC ini tidak memiliki tim polisi sehingga membuat mereka hanya bergantung pada kepolisian negara-negara anggotanya untuk menangkap kedua buronan tersebut dan negara anggota ICC juga tampaknya kurang sanggup untuk menangkap dan menyerahkan para buronan sehingga hal ini membuat penangkapan tidak berjalan lancar (O'Brien 2025).

2.2 Upaya Afrika Selatan dalam Forum Internasional ICJ

Kontribusi yang diberikan oleh Israel kepada Palestina tidak berhenti pada sebelum tahun 2023 tetapi masih berlanjut hingga setelahnya yang mana selanjutnya Afrika Selatan menggugat Israel ke ICJ pada 29 Desember 2023. Dalam gugatan tersebut Afrika Selatan memohon kepada ICJ agar mengeluarkan *provisional measures* (tindakan sementara) terhadap Israel. Kemudian, pada 11-12 Januari 2024 ICJ mengadakan sidang lisan terkait permohonan tindakan sementara Afrika Selatan (Galingging and Hutagalung 2026). Setelah itu, pada 26 Januari 2024 Afrika Selatan

mengajukan permintaan pertama mereka yang intinya berisi permintaan penangguhan operasi militer di Gaza, mencegah pengusiran paksa terhadap warga Palestina, memastikan akses terhadap makanan, air, dan bantuan kemanusiaan terbuka, mencegah penghancuran bukti yang berkaitan dengan tuduhan Afrika Selatan, dan mewajibkan Israel agar melaporkan semua perintah dari ICJ.

Tiga minggu kemudian Afrika Selatan mengajukan permintaan kedua kepada ICJ yang berisi agar ICJ dapat bertindak atas kemauannya sendiri atau yang maknanya ICJ dapat menetapkan tindakan sementara kepada Israel tanpa mengadakan persidangan dan mendengarkan opini semua pihak. Hal tersebut diminta Afrika Selatan agar ICJ bertindak lebih cepat karena mengingat serangan di Gaza yang semakin parah. Tetapi, Israel mengecam permohonan Afrika Selatan karena permintaan Afrika Selatan menyalahgunakan prosedur tindakan sementara (Becker 2024). Begitu pula dengan ICJ yang juga menolak permohonan Afrika Selatan tersebut

Selanjutnya melihat laporan mengenai kondisi kelaparan dan kurangnya makanan di Gaza yang semakin memburuk alhasil Afrika Selatan mengajukan permintaan ketiga pada 6 Maret 2024. Permintaan tersebut berisi agar Israel diwajibkan untuk menghapus kebijakan blokade Gaza dan memastikan jalur penyediaan makanan, air, tempat tinggal, dan bantuan medis terbuka. Melihat permintaan Afrika Selatan tersebut ICJ kemudian mengisyaratkan tindakan sementara lebih lanjut kepada israel pada 28 Maret 2024 (Becker 2024).

Sementara menunggu keputusan ICJ di bulan Maret 2024 operasi atau serangan Israel terhadap warga Gaza semakin cepat dan parah yang mana serangan dari Israel menghantam rombongan bantuan dari *World Central Kitchen* dan menewaskan 7

pekerja. Selain itu, operasi militer di Rafah juga menyebabkan tempat pengungsian terakhir warga Palestina hancur. Sehingga, melihat hal tersebut Afrika Selatan mengajukan permintaan keempat untuk tindakan sementara pada 10 Mei 2024. Permintaan tersebut berisi seruan kepada Israel agar segera menghentikan operasi militer di Rafah (Becker 2024). Maka dari itu, bisa dilihat bahwa keempat permintaan tindakan sementara yang diajukan oleh Afrika Selatan berfungsi sebagai pertolongan pertama untuk mencegah kerusakan yang lebih parah, meningkatkan pengiriman bantuan kemanusiaan, dll.

2.3 Faktor Afrika Selatan Menggugat Israel ke ICJ

Faktor pertama, Afrika Selatan menggugat Israel ke ICJ yakni karena adanya bukti yang kuat bahwa Israel telah melakukan tindakan genosida kepada Palestina. Hal ini, bisa dilihat pada peristiwa Nakba pada 1948 yang mana peristiwa tersebut merupakan proyek pembersihan etnis, pengusiran massal warga, dan pengosongan ratusan desa di Palestina oleh para militer zionis guna pendirian negara Yahudi di Palestina (Eghbariah 2024). Alhasil, lebih dari 700 ribu orang terpaksa meninggalkan tanah asli mereka dan harus mengungsi ke negara-negara Arab karena pengusiran yang dilakukan Israel (Fathia et al. 2025). Peristiwa tersebut dikatakan genosida karena jika mengacu pada Konvensi Genosida PBB perlakuan Israel terhadap Palestina ini merupakan tindakan yang dapat menyebabkan luka fisik atau mental kepada warga sipil Palestina dan merupakan tindakan yang sengaja membuat kehidupan yang menghancurkan dan mengakibatkan kerusakan fisik bagi warga Palestina (Aljazeera 2025).

Selain itu, Israel telah sengaja menciptakan kondisi yang menghancurkan bagi warga Palestina dan hal ini bisa dilihat dengan kebijakan blokade Gaza yang diterapkan Israel yang diterapkan Israel sejak 2007 hingga 2023 menyebabkan kelaparan parah, kurangnya layanan kesehatan, dan menghambat bantuan kemanusiaan masuk. Sehingga, adanya blokade yang sengaja menghancurkan suatu etnis ini termasuk merupakan tindakan genosida. Kemudian, konflik Israel ini juga menyebabkan penurunan angka kelahiran sebesar 41% di Palestina dan tingginya angka kematian ibu, keguguran bayi, dan kelahiran prematur pada tahun 2025. Penyebab penurunan angka kelahiran tersebut yakni disebabkan karena tindakan militer Israel yang kerap kali menyerang rumah sakit di Palestina karena Israel menganggap bahwa Hamas telah menyembunyikan para prajuritnya di rumah sakit (Tondo 2026). Sehingga, hal tersebut dapat membahayakan kelangsungan reproduksi wanita Palestina.

Faktor kedua, Afrika Selatan menggugat Israel yakni karena Afrika Selatan memiliki dasar hukum yang sah dan Afrika Selatan dan Israel merupakan negara anggota Konvensi Genosida 1948. Sehingga, berdasarkan pasal I dan IV Konvensi Genosida 1948 setiap negara anggota wajib untuk tidak melakukan genosida, mencegah genosida, dan menghukum pelaku genosida (Zahro 2025). Maka dari itu, Afrika Selatan yang melihat bahwa Israel telah memenuhi lima indikator pelaku genosida maka Afrika Selatan perlu untuk mengajukan gugatan ke ICJ guna menghukum pelaku genosida. Sehingga, hal tersebut menunjukkan bahwa Afrika Selatan sebagai negara anggota benar-benar mematuhi hukum internasional Konvensi Genosida 1948.

Faktor ketiga, Afrika Selatan mengajukan gugatan terhadap Israel ke ICJ dikarenakan adanya kesamaan historis Afrika Selatan dan Palestina yang sama-sama mengalami penjajahan dan penindasan. Persamaannya yakni Afrika Selatan pada era apartheid tahun 1948 mereka dijajah oleh warga kulit putih Afrika Selatan sementara pada tahun yang sama Palestina juga sedang mengalami penjajahan ganda dari aktor eksternal yakni Israel dan aktor Internal yakni *Palestinian Authority* (PA). Selain itu, persamaan lainnya yakni ada pada ketidakadilan pembagian lahan yang mana warga kulit putih di Afrika Selatan menguasai 87 persen tanah sedangkan di Palestina sebesar 60% tanah di tepi barat dikendalikan penuh oleh Israel dengan sekitar 300.000 warga Palestina dan 400.000 pemukim Israel yang tinggal di tepi barat (Anera.org 2023).

Faktor keempat, yakni dikarenakan Afrika Selatan mempunyai *legal standing* yang kuat dan *legal standing* Afrika Selatan yakni didasarkan pada Pasal IX yang memberikan hak kepada negara anggota PBB untuk menyelesaikan sengketa melalui hukum internasional. Kemudian, pada pasal tersebut juga mengatur jika terdapat perselisihan antara negara-negara anggota Konvensi Genosida yang diduga melanggar konvensi genosida maka salah satu atau beberapa negara dapat mengajukan gugatan terhadap negara tersebut ke ICJ (Asasiyah et al. 2025). Maka dari itu, meskipun Afrika Selatan tidak dirugikan dalam konflik Israel-Palestina ia tetap bisa menggugat Israel ke pengadilan dikarenakan Afrika Selatan merupakan sesama negara anggota Konvensi Genosida 1948 bersama dengan Israel.

Terakhir, faktor Afrika Selatan mengajukan gugatan terhadap Israel ke ICJ yakni untuk menguji efektivitas tatanan hukum internasional ICJ dan keefektifitasan lembaga ini dapat dilihat dengan mereka mengeluarkan perintah cepat untuk tindakan

sementara kepada Israel. Selain itu, Afrika Selatan juga ingin mewujudkan perdamaian atau rekonsiliasi berkelanjutan antara Israel dan Palestina dan hal tersebut dikarenakan Afrika Selatan merupakan salah satu negara yang berhasil melakukan transisi damai yang dulunya kebijakan Afrika Selatan berlandaskan sistem pemisahan rasial setelah apartheid berakhir berubah menjadi kebijakan yang berlandaskan hak asasi manusia (Morgan 2024). Maka dari itu, melihat Afrika Selatan sebagai negara memiliki pemahaman lebih dalam mengenai kolonialisme dan hanya diam melihat penindasan yang dialami Palestina maka hal tersebut membuat Afrika Selatan menjadi munafik dan menjadi penghinaan bagi para pemimpin dan para aktivis hak asasi manusia yang berjuang dalam penghapusan sistem apartheid.

BAB III

ANALISIS PERAN AFRIKA SELATAN DALAM PENYELESAIAN

KONFLIK ISRAEL - PALESTINA

Untuk menganalisis mengenai peran Afrika Selatan dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina di ICJ pada bab ini penulis akan menggunakan *role theory* oleh Sebastian Harnisch untuk menjelaskan bagaimana persepsi Afrika Selatan membangun identitas dan bagaimana harapan dari aktor lain dapat mempengaruhi aksi nyata Afrika Selatan menggunakan tiga komponen *role theory* diantaranya yakni *role conception*, *role expectation*, dan *role enactment*. Ketiga komponen tersebut merupakan fungsi dari *role theory* yang digunakan untuk menjelaskan proses kebijakan Afrika Selatan mulai dari bagaimana ia melihat negaranya memiliki kesamaan historis dengan Palestina yang kemudian memicu adanya ekspektasi-ekspektasi dari aktor lain untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina dan kemudian ekspektasi-ekspektasi tersebut diwujudkan dalam aksi nyata yakni dengan menggugat Israel ke ICJ pada 29 Desember 2023.

3.1 Role Conception

Makna dari *Role Conception* itu sendiri yakni persepsi atau bagaimana suatu negara melihat diri atau perannya pada sistem internasional (Harnisch 2010). Persepsi Afrika Selatan yang melihat dirinya sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, anti penjajahan, dan anti diskriminasi terbentuk karena pengalaman apartheid

pada 1948. Sistem tersebut berakar dari sejarah kolonisasi dan perbudakan Afrika Selatan pada abad ke-17 yang mana warga kulit putih memandang warga kulit hitam Afrika Selatan ini sebagai alat untuk membangun negara Afrika Selatan menjadi kawasan industrial. Kemudian, pada 1863 di temukanlah sumber emas dan berlian di Afrika Selatan yang semakin menyebabkan warga kulit hitam Afrika diperbudak dan dieksploitasi untuk mengeruk tambang sedangkan kelompok borjuis atau Belanda yang menikmati hasil kekayaan tambang tersebut (Blakemore 2019).

Selain ditemukannya sumber emas dan berlian pada tahun 1940 hingga 1946 ketika perang dunia kedua meledak Afrika Selatan mengalami transformasi ekonomi dan sosial yang signifikan. Transformasi tersebut disebabkan karena banyaknya permintaan terhadap pabrik-pabrik untuk memenuhi kebutuhan perang dan militer dalam jumlah yang sangat banyak sehingga menyebabkan seluruh warga kulit putih dan hitam Afrika Selatan sama-sama bekerja. Selanjutnya, karena banyaknya warga kulit hitam Afrika Selatan tinggal di perkotaan menimbulkan persaingan antara warga kulit putih dan hitam Afrika Selatan untuk mencari pekerjaan sehingga hal tersebut memicu kekhawatiran warga kulit putih. Mulai dari situ, pemerintahan menerapkan kebijakan yang membatasi warga Afrika Selatan masuk ke kota seperti dilarangnya masuk warga kulit hitam Afrika Selatan ke kota-kota tanpa dokumen yang sah dan mereka hanya boleh tinggal di daerah khusus (Clark and Worger 2011).

Kebijakan yang membatasi warga Afrika Selatan itulah yang kemudian menjadi salah satu awal mula sistem apartheid diterapkan. Kemudian, ketika sistem apartheid ini disahkan oleh Perdana Menteri Afrika Selatan bernama Daniel Francois pada 1948 pembatasan hak warga kulit hitam semakin parah. Hal ini dibuktikan bahwa meskipun

populasi warga kulit putih hanya sebesar 20 persen tetapi mereka dapat mengendalikan sebesar 87 persen tanah sedangkan pemerintah hanya mengalokasikan tanah sebesar 13 persen kepada warga kulit hitam Afrika Selatan. Tidak hanya itu, populasi berlebih seperti perempuan, anak-anak, orang tua, dan penyandang disabilitas ditempatkan di lokasi khusus dan terpencil. Akibatnya, Afrika Selatan mengalami kemiskinan ekstrim dan kemunduran (Springfield Committee Against Apartheid in South Africa 1985).

Melihat ketidakadilan dari sistem apartheid maka Afrika Selatan kemudian melakukan perlawanan dengan membentuk organisasi *African National Congress* (ANC) pada 1952 di bawah kepemimpinan Nelson Mandela. Hasilnya, organisasi tersebut berhasil mengatasi apartheid di Afrika Selatan dengan berhasil menghapus undang-undang yang diantaranya ada *Land Act* yang merupakan kebijakan pelarangan warga kulit hitam memiliki tanah selain di wilayah yang telah ditentukan. Kemudian ada *Group Areas Act* yang merupakan aturan pemisahan tempat tinggal antara kulit hitam dan putih. Terakhir, ada *Population Registration Act* yang merupakan undang-undang yang mewajibkan seluruh warga Afrika Selatan mendaftarkan diri mereka sebagai warga kulit hitam, berwarna, atau putih (McKenna 2026). Sehingga, Afrika Selatan sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, anti penjajahan, dan anti diskriminasi perlu untuk membantu kebebasan Palestina.

Maka dari itu, melihat adanya kesamaan historis atas penjajahan yang dilakukan Israel terhadap Palestina, Afrika Selatan sebagai *regional leader* melihat dirinya memiliki tanggung jawab untuk memimpin atau mewakili penyelesaian konflik di suatu wilayah. Hal ini, dibuktikan pada ucapan Cyril Ramaphosa ketika sesi tanya jawab di National Assembly, Cape Town yang berbunyi “*South Africa plays a leading*

role on several continental issues...”(Ramaphosa, 2024). Kemudian, dalam konteks penulisan ini Afrika Selatan merasa bertanggung jawab untuk memimpin atau mewakili negara-negara benua Afrika salah satunya dalam mengatasi penyelesaian konflik Israel-Palestina. Selain itu, kepercayaan yang diberikan oleh negara-negara Selatan kepada Afrika Selatan selain dikarenakan adanya kesamaan historis juga karena kebijakan luar negerinya yang sangat menekankan hak asasi manusia (Alden and Pere 2004). Sehingga, kedua hal tersebut mendorong Afrika Selatan untuk mengajukan tuntutan genosida Israel terhadap Palestina di ICJ.

Afrika Selatan hingga akhirnya menjadi *regional leader* di benua Afrika dicapai melalui strategi domestiknya terutama pada era pemerintahan Jacob Zuma yang berusaha menekan Afrika Selatan agar masuk ke berbagai komunitas global guna menumbuhkan ekonomi yang berkelanjutan. Alhasil strategi ini semakin aktif sejak 2010 diantaranya dibuktikan dengan Afrika Selatan masuk ke dalam BRICKS dan menjadi tuan rumah pertemuan puncak forum IBSA (India, Brasil, and South Africa) (Costa 2023).

Selain, melihat dirinya sebagai *regional leader* Afrika Selatan juga melihat dirinya sebagai *Regional Protector* yang menurut Robert Mc Namara negara seharusnya berperan dalam membantu melindungi dan memberikan keamanan kepada negara-negara berkembang yang membutuhkan dan meminta bantuan kita. Afrika Selatan sebagai *Regional Protector* tercermin pada pidato Cyril Ramaphosa di Tokyo International Conference yang berbunyi "*South Africa, as Regional Oversight Mechanism, will work with partners to secure lasting peace in the region* " (Ramaphosa 2025). Kemudian, dalam konteks penulisan ini Afrika Selatan harus membantu

melindungi Palestina yang merupakan negara berkembang. Kemudian, Afrika Selatan dalam melindungi Palestina selain menuntut tindakan genosida Israel ke ICJ mereka juga telah menyerukan agar dilaksanakan gencatan senjata segera, pembukaan blokade bantuan kemanusiaan, penghentian pasokan senjata kepada Israel, pembebasan terhadap warga sipil, dan pembukaan dialog komprehensif antara Palestina-Israel (South African Government 2023).

3.2 Role Expectation

Afrika Selatan sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, anti penjajahan, dan anti diskriminasi melihat adanya puncak konflik di Gaza yang semakin parah ketika serangan 7 Oktober 2023 kemudian memicu adanya *role expectation*. *Role Expectation* merupakan ekspektasi atau harapan yang diharapkan aktor lain terhadap suatu negara (Harnisch 2010). Menurut Harnisch *role expectation* terbentuk dari dua hal yakni *ego* atau harapan dari aktor tersebut dan *alter* yang maknanya ekspektasi dan tuntutan dari aktor lain mengenai tindakan apa yang sebaiknya mereka lakukan. Pada penulisan ini *alter* yang dipilih oleh penulis untuk dianalisis yakni ada dari negara-negara *global south* dan komunitas internasional dan Kedua aktor tersebut dipilih sebagai sumber karena mereka secara tegas menyampaikan harapan dan dukungan kepada Afrika Selatan yang menggugat Israel ke ICJ.

Pembahasan pertama yakni mengenai ekspektasi yang datang dari negara-negara *global south* dan salah satu faktor penyebab timbulnya ekspektasi terhadap Afrika Selatan lainnya yakni dikarenakan ekonominya yang paling besar di Benua Afrika dengan proyeksi GDP sebesar \$443.64 miliar pada tahun 2026 menurut IMF

(Adegboyega 2026). Sehingga, diharapkan agar dapat menggunakan ICJ untuk menuntut atas dugaan genosida yang dilakukan Israel. Selain itu, Afrika Selatan juga diharapkan untuk terus memimpin kasus tuntutan tersebut guna melawan standar ganda barat karena esensi standar ganda barat yang telah mencitrakan kaum Zionis atau Israel sebagai korban sedangkan mereka mencitrakan warga Palestina sebagai pelaku atau penyerang (Indonesia Islam Times 2024).

Contoh negara-negara *global south* yang mendukung gugatan Afrika Selatan terhadap Israel diantaranya ada Pakistan yang telah menyatakan dukungannya terhadap Afrika Selatan “*Pakistan supports the application filed by South Africa before the International Court of Justice concerning Israel’s violations of its obligations under the 1951 Genocide Convention in relation to the Palestinian people in Gaza*” (Ministry Of Foreign Affairs Government Of Pakistan 2024). Selain itu, dukungan juga datang dari Malaysia melalui kementerian luar negerinya yang menyatakan “*Malaysia welcomes the commencement of the public hearings of the proceedings instituted by South Africa against Israel before ICJ from 11 to 12 January*” (Malaysia 2024).

Pembahasan kedua yakni mengenai ekspektasi dari kelompok internasional yang mana mereka berekspektasi agar Afrika Selatan selalu konsisten dalam menegakkan hukum internasional. Hal ini dikarenakan Afrika Selatan merupakan anggota dari *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* atau Konvensi Genosida 1948 yang mana konvensi ini dijadikan sebagai dasar hukum Afrika Selatan untuk menggugat Israel di ICJ karena sebagai anggota mereka wajib untuk mencegah dan harus menghukum pelaku genosida. Selain itu, konvensi tersebut juga dapat menjadi *legal standing* atau hak yang sah bagi Afrika Selatan untuk

mengajukan gugatan di mahkamah internasional atas nama kepentingan kelompok tertentu (ADCO Law 2022).

Dalam proses mewujudkan ekspektasi atau harapan terdapat Afrika Selatan juga memiliki tantangan yakni agar tetap menyeimbangkan ekspektasi antara negara-negara *global south* dan negara-negara barat. Hal ini, dikarenakan agar tetap menjaga stabilitas politik Afrika Selatan dan jika tidak dianggap serius dapat menimbulkan konflik antara Afrika Selatan dengan negara-negara *global south* dan negara-negara Barat. Lalu, seorang aktor tidak harus memenuhi semua ekspektasi dikarenakan menyebabkan aktor tidak fokus terhadap tujuannya dan kehilangan jati diri. Sehingga, dalam konteks ini Afrika Selatan memilih untuk memprioritaskan harapan dari negara-negara *global south* untuk menggugat Israel di ICJ karena yang sesuai dengan peran Afrika Selatan yang anti apartheid (Karim 2022).

Kelompok internasional yang mendukung kebijakan Afrika Selatan diantaranya yakni *African Union* (AU). Hal ini, dibuktikan ketika pemimpin AU Moussa Faki Mahamat pada pidatonya di Somalia mengatakan mereka menyambut baik gugatan yang diajukan Afrika Selatan “*The continental body welcomed the urgent provisional measures ordered by the ICJ in the application brought by South Africa*” (Mahamat 2024). Selanjutnya, terdapat juga *Organisation of Islamic Cooperation* (OIC) yang menyatakan dukungannya melalui deklarasi KTT NAM ke-19 yang berbunyi

“They welcomed also the 29 December 2023 application filed by a Member State of the Movement, South Africa, instituting proceedings against Israel before the ICJ concerning alleged violations by Israel of its obligations under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in relation to Palestinians in the Gaza Strip “ (Non Alignment Movement, 2024).

Kemudian, dalam mewujudkan ekspektasi Afrika Selatan menghadapi *role conflict* antara negara-negara pro Palestina dan negara-negara pro Israel. *Role Conflict* merupakan kondisi dimana munculnya dua atau lebih harapan secara bersamaan yang bertentangan dan tidak sesuai terhadap perilaku suatu aktor (Karim 2022). *Role Conflict* Afrika Selatan muncul karena negara-negara pro Israel seperti negara Amerika dan Uni Eropa mereka memiliki pendapat atau pemikiran bahwa tuduhan genosida terhadap Israel oleh Afrika Selatan itu tidak benar. Lebih parah lagi negara terdakwa yakni Israel beranggapan bahwa gugatan yang diajukan Afrika Selatan terhadap dirinya itu tidak memiliki dasar faktual dan hukum (O'Regan 2026).

Lalu, yang membuat Amerika mengklaim bahwa genosida yang dilakukan Israel itu tidak benar yakni karena penggunaan kata “Genosida” yang mana makna dari kata tersebut yakni penghancuran fisik secara seluruh maupun sebagian suatu kelompok ungkap pemerintah Amerika “*To avoid any doubt, the United States affirms, in the strongest terms possible, that the allegations of ‘genocide’ against Israel are false*“(United States of America 2026). Sedangkan, bagi Israel dan sekutunya penggunaan kata genosida itu tidak tepat karena mereka beranggapan bahwa Israel tidak berusaha untuk menghancurkan Palestina melainkan mereka melakukan perang untuk melawan Hamas.

Sudut pandang dari Israel dan sekutunya Amerika justru melihat bahwa tindakan Israel selama ini terhadap warga Palestina merupakan niat baik mereka untuk melindungi warga Palestina dari bahaya. Hal ini dikarenakan menurut Israel dengan melakukan pengusiran paksa atau memindahkan warga Palestina di Gaza merupakan

upaya bagus untuk melindungi mereka agar aman dari bahaya saat Israel sedang melakukan perang terhadap Hamas. Selain itu, Israel malah merasa disalahkan oleh Hamas karena pada tuntutan yang diajukan terdapat beberapa ketidakpastian salah satunya yakni jumlah warga yang tewas di Gaza itu disebabkan karena serangan dari Israel atau karena serangan yang disengaja maupun yang tidak disengaja dari Hamas. Lalu, menurut Amerika penyebab banyaknya korban yang tewas dikarenakan gagal roket yang ditembakkan oleh Palestinian Islamic Jihad tetapi Hamas malah mengatakan itu perbuatan Israel (American Jewish Committee 2026).

Oleh karena itu, berdasarkan pemikiran atau sudut pandang Amerika yang tidak setuju terhadap gugatan bahwa Israel telah melakukan genosida terhadap Palestina kemudian mereka mengajukan deklarasi dan penolakan ke ICJ pada 12 Maret 2026. Selain itu, Amerika juga menyatakan perlunya intervensi atau campur tangan dalam gugatan kasus ini dikarenakan Amerika ingin memberikan penjelasan terkait pasal-pasal Konvensi Genosida 1948 secara Amerika merupakan salah satu negara yang turut serta dalam merancang konvensi tersebut. Lalu, dalam intervensi nya Amerika tidak sendirian tetapi terdapat negara Namibia, Hongaria, dan Fiji yang mendukung perlunya intervensi hal ini berdasarkan Pasal 63 Statu Pengadilan yang memungkinkan negara anggota konvensi untuk ikut campur dalam suatu kasus meskipun mereka tidak terlibat didalamnya (O'Regan 2026).

Sementara itu, bagi negara-negara pro palestina seperti Brazil, Spanyol, Irlandia, Meksiko, Turki, dll justru memiliki pemikiran yang bertentangan dengan negara barat dan Israel yang mana perbuatan yang selama ini dilakukan oleh Israel merupakan kejahatan genosida (Arbar 2025). Hal ini, dibuktikan dengan Spanyol yang

mendukung gugatan yang diajukan Afrika Selatan terhadap Israel ke ICJ dengan mengajukan intervensi “ *Spain has today submitted an intervention statement to the International Court of Justice in the proceedings brought by South Africa against Israel regarding the Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip* “ (Albares 2024). Selain itu, presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva juga pada pidatonya di Bogota, Colombia juga mengatakan bahwa apa yang terjadi di Palestina adalah genosida “*It is a genocide. Thousands of children are dead and thousands are missing. Soldiers are not dying. Women and children are dying at the hospital* “ (Lula 2024).

Bahkan kelompok hak asasi manusia Israel yang terkenal sendiri telah mengatakan bahwa Israel telah melakukan tindakan yang terorganisir dan secara sengaja untuk menghancurkan warga Palestina di Gaza. Selain itu, pensiunan Mayor Jenderal Israel bernama Yitzhak Brick telah mengakui bahwa semua amunisi tindakan genosida tersebut dilakukan dari bantuan Amerika. Kemudian, dalam aksi genosida tidak hanya Donald Trump yang antusias tetapi terdapat sekutu dalam pemerintahannya seperti senator Tom Cotton, Lindsey Graham, Randy Fine yang sangat suka menghancurkan puing-puing Gaza, gemar menyerukan nuklir di Gaza, dan membiarkan warga Gaza agar kelaparan (Hasan 2025).

Bukti lain yang menunjukkan bahwa Israel telah melakukan kejahatan genosida yakni ketika pada November 2023 Amerika malah mengirim bantuan militer sebesar \$14,5 kepada Israel padahal saat itu ICJ sedang melaksanakan sidang. Selain itu, sebelumnya Afrika Selatan juga telah mengajukan bukti dokumen yang berisi

banyaknya catatan kekejaman yang dilakukan Israel serta deklarasi niat genosida yang dibuat pejabat senior Israel yang berisi seruan untuk Nakba kedua dan ketiga. Tetapi, pada persidangan Israel tidak dapat memberikan respon yang valid dan malah dalam presentasinya mereka hanya fokus untuk menuduh Hamas karena Hamas lah yang membuat keadaan Gaza seperti ini terjadi (Vijay 2024). Sehingga, dari sini bisa dilihat bahwa kasus ini bukan mengenai fakta melainkan perbedaan sudut pandang antara keduanya yang mana Afrika Selatan melihat kasus ini sebagai kejahatan genosida sedangkan Israel melihat kasus ini sebagai pembelaan diri atas peristiwa 7 Oktober 2023.

Oleh karena itu, melihat dua pemikiran yang bertentangan dari negara yang mendukung dan menentang israel maka Afrika Selatan tepat untuk membawa kasus Palestina-Israel ini melalui jalur hukum internasional ICJ guna menyeimbangkan dua pemikiran yang bertentangan. Kemudian, Afrika Selatan memilih jalur hukum internasional ICJ selain karena fungsinya yang untuk mengadili sengketa hukum antar negara juga karena Afrika Selatan ingin menguji legitimasi dan efektivitas tatanan hukum internasional melalui ICJ. Selain itu, motivasi Afrika Selatan membawa kasus ini ke jalur hukum yakni karena adanya tanggung jawab moral dan guna mencapai kesetaraan atau keadilan pada sistem internasional. Karena, sistem internasional bukan hanya memberikan keadilan untuk negara yang terkuat tetapi juga untuk memberikan perdamaian nyata bagi negara yang berkembang maupun rentan (Morgan 2024).

3.3 Role Enactment

Setelah Afrika Selatan mengetahui bagaimana ia melihat dirinya sebagai negara yang menekankan hak asasi manusia dan adanya ekspektasi atau harapan dari negara-negara *global south* yang diberikan kepada Afrika Selatan. Kemudian, dalam mewujudkan ekspektasi-ekspektasi tersebut diwujudkan melalui *role enactment* atau aksi nyata yakni dengan menggugat Israel atas dugaan genosida di ICJ pada 2023. *Role enactment* merupakan tindakan nyata yang diambil suatu negara (Harnisch 2011). Yang mana, tindakan yang mereka ambil itu dipengaruhi oleh *role conception* suatu negara agar suatu aktor dalam mengambil keputusan selalu konsisten.

Tindakan yang diambil Afrika Selatan setelah menggugat Israel atas dugaan genosida ke ICJ pada 29 Desember 2023 yakni dengan mengajukan *provisional measures* (tindakan sementara) ke ICJ dan total ada empat permohonan dari 26 Januari 2024 hingga 10 Mei 2024. Setelah itu, pada 28 Oktober 2024 Afrika Selatan juga mengajukan berkas yang berisi bukti-bukti genosida yang telah dilakukan Israel guna persiapan sidang perkara mendatang. Kemudian, pada 2025 hingga saat ini gugatan ini masih berlanjut dan belum ada putusan resmi dari ICJ mengenai apakah Israel terbukti telah melakukan genosida terhadap Palestina.

Kemudian, faktor Afrika Selatan menggunakan jalur diplomasi dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina melalui ICJ karena pertama, Afrika Selatan masih merupakan negara berkembang. Yang mana, jika suatu negara melihat dirinya sebagai negara yang masih berkembang maka mereka harus mencari aman dalam mengambil sebuah keputusan misalnya dengan berdiplomasi atau memilih jalur hukum. Sebaliknya, jika suatu negara melihat dirinya sebagai negara yang berpengaruh besar

mereka bisa saja mengambil keputusan yang cenderung agresif seperti menggunakan cara militer (Wehner and Thies 2021). Sehingga, jika kita melihat dalam konteks ini Afrika Selatan mengambil keputusan dengan memilih jalur hukum melalui mahkamah internasional (ICJ) karena mereka merupakan negara yang terbatas sementara lawannya yakni Israel merupakan negara yang didukung negara berpengaruh alias Amerika.

Kedua, faktor yang membuat Afrika Selatan memilih jalur diplomasi melalui ICJ karena jika dilihat dari situs resmi mahkamah internasional (ICJ) dijelaskan bahwa mereka merupakan pengadilan yang menangani dua jenis kasus yakni mengenai sengketa hukum antar negara anggotanya secara damai dan memberikan pendapat hukum kepada PBB atau badan khusus lainnya (International Court Of Justice, n.d.). Sehingga, berdasarkan fungsi pertama tersebut merupakan tindakan yang tepat bagi Afrika Selatan untuk memilih ICJ sebagai jalur hukum. Berbeda dengan *International Criminal Court* (ICC) yang merupakan organisasi yang berfungsi untuk menangani kejahatan serius seperti genosida, perang, dan kemanusiaan. Selain itu, ICC juga berfungsi agar selalu memastikan bahwa para pelaku kejahatan ini harus dihukum (Begem 2024).

Selain itu, ICJ ini merupakan the *principal organ* atau organ utama dalam PBB yang harus dapat menyelesaikan sengketa antar negara secara damai dan dilarang menggunakan kekerasan guna tercapainya perdamaian dunia yang mana cocok dengan landasan hukum Afrika Selatan yang mengutamakan hak asasi manusia. Landasan hukum mengenai hak asasi manusia Afrika Selatan sendiri tercantum pada konstitusi 1996 Bab 2 - pasal 7 hingga 39 (Constitutional Court of South Africa n.d.). Sehingga,

Afrika Selatan sebagai negara anggota Konvensi Genosida dan sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia melihat genosida yang dilakukan Israel terhadap Palestina perlu untuk dibawa ke pengadilan ICJ.

"As a signatory to that convention, South Africa carries a responsibility, like other States that are signatory to the convention, to prevent acts of genocide wherever they occur. It was in fulfilment of this responsibility and to prevent further civilian deaths and destruction that South Africa took this case to the court"(Ramaphosa, 2024)..

Lalu, aksi nyata Afrika Selatan membantu Palestina dengan mengajukan gugatan terhadap Israel dipengaruhi oleh hubungan persahabatan mereka yang mana hubungan tersebut terjadi ketika sebuah negara merasa mempunyai kesamaan entah dalam pengalaman historis dengan negara lain mereka akan melihat diri mereka sebagai satu kelompok yang kemudian terbentuklah berbagai kerjasama dan identitas kolektif yang sama (Suganami 2002). Dalam konteks ini, Afrika Selatan dan Palestina merupakan satu kelompok berdasarkan kesamaan historis mereka dalam melawan kolonialisme. Oleh karena itu, bantuan yang diberikan Afrika Selatan kepada Palestina merupakan bentuk persahabatan dan persahabatan mereka dapat dibuktikan pada pidato Nelson Mandela yang mengatakan *"We know too well that our freedom is incomplete without the freedom of the Palestinians"*(Mandela 1997).

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Konflik antara Israel - Palestina yang masih berlangsung hingga saat ini memicu berbagai reaksi dari beberapa negara salah satunya Afrika Selatan yang merespon konflik ini dengan mengajukan gugatan terhadap Israel di mahkamah internasional (ICJ) dan gugatan yang diajukan Afrika Selatan terhadap Israel berlandaskan Konvensi Genosida 1948 pasal I, II, IV, dan IX. Gugatan tersebut diajukan karena Israel telah memenuhi lima 5 indikator ciri tindakan genosida yang ada di pasal II Konvensi Genosida 1948. Selain itu, peran Afrika Selatan terbentuk oleh tiga komponen dari *role theory* milik Sebastian Harnisch diantaranya yakni *role conception*, *role expectation*, dan *role enactment*.

Pada *role conception* Afrika Selatan melihat dirinya sebagai negara yang menjunjung hak asasi manusia, anti penjajahan, dan diskriminasi. Yang mana, identitas peran Afrika Selatan tersebut terbentuk melalui sejarah dan perjuangan Afrika Selatan dalam melawan Apartheid. Sehingga, Afrika Selatan melihat penjajahan yang dialami Palestina perlu untuk membantu karena empati dan bentuk kepedulian atas persamaan historis mereka yang sama-sama mengalami penjajahan.

Sementara itu, pada *role expectation* Afrika Selatan mendapatkan dua ekspektasi dari negara-negara *global south* dan kelompok internasional. Ekspektasi dari negara-negara *global south* muncul dikarenakan Afrika Selatan merupakan negara anggota BRICS dan merupakan negara terkuat di benua Afrika. Sehingga, dengan pengaruh tersebut menjadikannya sebagai representasi dalam penyelesaian konflik

Israel-Palestina. Sedangkan, kelompok internasional berekspektasi agar Afrika Selatan selalu konsisten dalam menegakkan hukum internasional terutama dalam konflik Israel-Palestina secara Afrika Selatan merupakan anggota dari Konvensi Genosida 1948.

Terakhir, Afrika Selatan dalam menghadapi *role conflict* antara negara-negara pro-Palestina dan Israel kemudian memilih untuk mengajukan gugatan terhadap Israel ke mahkamah internasional (ICJ). Yang mana, aksi diplomasi tersebut merupakan bentuk dari *role enactment* yang dipilih Afrika Selatan yang masih negara berkembang. Selain itu, dalam membawa kasus ini ke mahkamah internasional terdapat pula kepentingan Afrika Selatan yakni untuk sekaligus menguji legitimasi dan efektivitas tatanan hukum internasional melalui ICJ. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menunjukkan bahwa peran Afrika Selatan dalam penyelesaian kasus Israel-Palestina melalui gugatan terbentuk oleh ketiga komponen konsep *role identity* yakni *role conception*, *role expectation*, dan *role enactment*.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan penelitian ini penulis berharap agar Afrika Selatan dan seluruh anggota Konvensi Genosida 1948 untuk meningkatkan solidaritas satu sama lain dan bersatu dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Selain itu, untuk mahkamah internasional (ICJ) agar dapat membuktikan efektivitasnya dalam menegakkan keadilan dengan memberi sanksi atau hukuman yang setimpal untuk Israel. Hal ini dilakukan guna mewujudkan tujuan utama PBB maupun organisasi internasional lainnya yakni menjaga dan menciptakan perdamaian dunia serta mempertahankan

identitas Afrika Selatan yang anti penjajahan, diskriminasi, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Untuk penelitian selanjutnya disarankan agar dapat membahas lebih dalam mengenai *role conflict* terutama bagaimana ekspektasi negara-negara *global south* dan negara-negara barat dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan luar negeri Afrika Selatan dalam menangani konflik Israel Palestina. Sehingga, penelitian tersebut dapat memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai bagaimana atau faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pembentukan atau pelaksanaan peran suatu negara di sistem internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- ADCO Law. 2022. "Legal Standing in Law Enforcement." ADCO Law. <https://adcolaw.com/blog/legal-standing-in-law-enforcement/>.
- Adegboyega, Ayodeji. 2026. "IMF data compares Africa's biggest economies in 1990 and 2026, showing how South Africa, Egypt and Nigeria dominate growth while the continent still lags global GDP expansion." *Business Insider Africa*. <https://africa.businessinsider.com/local/markets/imf-data-compares-africas-biggest-economies-in-1990-and-2026-showing-how-south-africa/j8ywz11>.
- Adigbuo, Richard. 2007. "Beyond IR Theories: The Case for National Role Conceptions." <http://dx.doi.org/10.1080/02589340701336286>.
- Adryamarthanino, Verelladevanka, and Tri Indriawati. 2023. "Kronologi Serangan Hamas ke Israel pada Oktober 2023." *Kompas.com*, October 13, 2023. <https://www.kompas.com/stori/read/2023/10/13/140000879/kronologi-serangan-hamas-ke-israel-pada-oktober-2023>.
- Aidini, Nur, and Nur L. Hidayatullah. 2025. "SEKURITISASI HAMAS DALAM KEBIJAKAN ISRAEL PASCA SERANGAN 7 OKTOBER 2023." *Journal Politique* 5 (Januari): 21-35. <https://doi.org/10.15642/politique.2025.5.1.21-35>.
- Akbar, M. F., and Manuel B. Genoves. 2024. "South Africa Sues International Court Over Israel's Palestinian Genocide under International Law." *Department of International Law, Faculty of Law, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia*. 6 (Juli). <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/lajil/article/view/3427/2129>.
- Aksunger, Selman. 2025. "Masyarakat Belanda terus gelar aksi protes terhadap Israel di sejumlah universitas." <https://www.aa.com.tr/id/budaya/masyarakat-belanda-terus-gelar-aksi-protes-terhadap-israel-di-sejumlah-universitas/3575481>.
- Alaia, Safia, Windiani Reni, and Zuliyan M. Arief. 2025. "ADVANCING SOUTH AFRICA'S POST-APARTHEID FOREIGN POLICY UNDER CYRIL RAMAPHOSA'S PRESIDENTIAL REGIME: THE UPWARD TRAJECTORY OF SUPPORT FOR PALESTINE." *FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO*. <https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/33048/>.

- Alden, Chris, and Garth le Pere. 2004. "South Africa's Post-Apartheid Foreign Policy: From Reconciliation to Ambiguity." 31. <https://www.jstor.org/stable/4006892>.
- Aljazeera. 2025. "Israel carrying out 'live-streamed genocide' in Gaza, Amnesty says." Al Jazeera. <https://www.aljazeera.com/news/2025/4/29/israel-carrying-out-live-streamed-genocide-in-gaza-amnesty-says>.
- American Jewish Committee. 2026. "5 Reasons Why the Events in Gaza Are Not 'Genocide.'" American Jewish Committee. <https://www.ajc.org/news/5-reasons-why-the-events-in-gaza-are-not-genocide>.
- amnesty.org. 2024. "Amnesty concludes Israel is committing genocide in Gaza." Amnesty International. <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2024/12/amnesty-international-concludes-israel-is-committing-genocide-against-palestinians-in-gaza>.
- Amnesty.org. 2026. "EU: Failure to suspend EU-Israel Association Agreement shows contempt for civilian lives." Amnesty International. <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2026/04/eu-failure-to-suspend-eu-israel-association-agreement-shows-contempt-for-civilian-lives/>.
- Anadolu Ajansı. n.d. "'If that's not genocide, I don't know what genocide is': Brazilian president says on Gaza situation." Accessed 2024. <https://www.aa.com.tr/en/americas/-if-thats-not-genocide-i-dont-know-what-genocide-is-brazilian-president-says-on-gaza-situation/3146498>.
- Andrews, Penelope. 2025. "Human Rights And Foreign Policy: South Africa's Genocide Complaint Against Israel At The International Court Of Justice." (Juli). https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5339182.
- Anera.org. 2023. "What are Area A, Area B, and Area C in the West Bank?" Anera. <https://www.anera.org/what-are-area-a-area-b-and-area-c-in-the-west-bank/>.
- Anews. 2024. "The African Union Commission chair, Moussa Faki Mahamat, has expressed his approval of the UN top court's verdict regarding Israel's actions in Gaza on Saturday. He stated through social media that the ruling reinforces the importance of adhering to intern." <https://www.anews.com.tr/africa/2024/01/27/african-union-chief-welcomes-un-court-gaza-ruling>.

- Apartheid Convention 1973. n.d. "Doc.10_International Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid.pdf." the United Nations. Accessed March 12, 2026. https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocities-crimes/Doc.10_International%20Convention%20on%20the%20Suppression%20and%20Punishment%20of%20the%20Crime%20of%20Apartheid.pdf.
- Arbar, Thea F. 2025. "Negara Ini Resmi Dukung Gugatan Afsel di ICJ soal Genosida oleh Israel Baca artikel CNBC Indonesia "Negara Ini Resmi Dukung Gugatan Afsel di ICJ soal Genosida oleh Israel." <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250922094429-4-668965/negara-ini-resmi-dukung-gugatan-afsel-di-icj-soal-genosida-oleh-israel>.
- Asasiyah, Aulia R., Danial, Mokhammad G. Vitrana, and Hambali. 2025. "CONTESTING GENOCIDE: SOUTH AFRICA'S LEGAL STANDING AND INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE'S REACH OVER ISRAEL." <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/tirtayasatjil/article/view/31695/15392#>.
- Asmar, Ahmed. 2025. "Jumlah korban tewas di Gaza capai 52.400 jiwa akibat serangan brutal Israel." Anadolu Ajansı. <https://www.aa.com.tr/id/dunia/jumlah-korban-tewas-di-gaza-capai-52400-jiwa-akibat-serangan-brutal-israel/3553440>.
- Azizah, Rahma. 2025. "Peran Afrika Selatan dalam Mendorong ICJ pada Manajemen Konflik Israel - Palestina Melalui Lensa Konstruktivisme." *Jurnal Kajian Hubungan Internasional* 4. <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/JKHI/article/download/12579/6237/32105>.
- Bahar, Adam A. 2025. *ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK - Pemikiran Seorang Pakar*. N.p.: Airlangga University Press. <https://omp.unair.ac.id/aup/catalog/book/1370>.
- BBC. 2025. "Israel and the Palestinians: History of the conflict explained." BBC, October 14, 2025. <https://www.bbc.com/news/articles/ckgr71z0jp4o>.
- Becker, Michael A. 2024. "CRISIS IN GAZA: SOUTH AFRICA V ISRAEL AT THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE (OR THE UNBEARABLE LIGHTNESS OF PROVISIONAL MEASURES)." (desember). https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5018178.

- Begem, Sarah S. 2024. "THE ROLE OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT: A LITERATURE REVIEW ON ITS EFFECTIVENESS AND LIMITATIONS." 5.
<https://idebahasa.or.id/escience/index.php/home/article/view/224/150>.
- Blakemore, Erin. 2019. "The Harsh Reality of Life Under Apartheid in South Africa | HISTORY." History.com.
<https://www.history.com/articles/apartheid-policies-photos-nelson-mandela>.
- Callista, Nathania, Maura Lysandra, and Deandra Tiffany. 2024. "ANALISA KEBIJAKAN ISRAEL YANG TIDAK SAH MENURUT HUKUM INTERNASIONAL." *Universitas Tarumanagara Jakarta, Indonesia* 4.
<https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/multilingual/article/download/799/690/1232>.
- Chiyemura, Frangton. 2017. "South Africa in BRICS: Prospects and Constraints." *UNIVERSITY OF THE WITWATERSRAND, JOHANNESBURG, SOUTH AFRICA*, (october).
<https://wiredspace.wits.ac.za/server/api/core/bitstreams/fd202952-6ed3-4dac-9fb3-3a921d1c8d4a/content>.
- Clark, Nancy L., and William H. Worger. 2011. *South Africa: The Rise and Fall of Apartheid*. N.p.: Longman.
- CNN Indonesia. 2024. *AS Sudah 49 Kali Veto Resolusi DK PBB soal Israel-Palestina Baca artikel CNN Indonesia "AS Sudah 49 Kali Veto Resolusi DK PBB soal Israel-Palestina" selengkapnya di sini:*
<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20241121120852-134-1169059/as-sudah-49-kal>, November, 2024.
<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20241121120852-134-1169059/as-sudah-49-kali-veto-resolusi-dk-pbb-soal-israel-palestina/2>.
- Constitutional Court of South Africa. n.d. "Human Rights in South Africa."
<https://www.concourt.org.za/index.php/56-the-bill-of-rights/human-rights-in-south-africa>.
- Costa, Murillo G. 2023. "South Africa as a Leading Regional Power in Africa? An Analysis of the Implementation of the African Union, Auda-Nepad and Agenda 2063." *Special Issue: Regionalism and the Sustainable Development Goals*.
<https://www.redalyc.org/journal/358/35875584009/html/>.
- Costopoulos, Efthymios G. 1997. "THE CONCEPT OF PLURALISTIC SECURITY COMMUNITY : AN ATTEMPT TO APPLY IT TO THE EUROPEAN UNION CASE." *A Thesis Submitted for the Degree of*

- MPhil at the University of St Andrews*. <https://research-repository.st-andrews.ac.uk/handle/10023/15358#:~:text=Abstract,embryonic%20theory%20of%20international%20pluralism>.
- Dabed, Emilio. 2021. "The Oslo Agreements and the Palestinian Authority: Or How to Convert Freedom Fighters into Docile Colonial Administrators." 161-175. https://shs.cairn.info/revue-confluences-mediterranee-2021-2-page-161?lang=en&fbclid=IwY2xjawM93OhleHRuA2FlbQIxMQABHmPC8F3LHLhmsUwn4xKGoxrBrnUjB3XTFeJUmys2rCVSeHXGPh1J-pD4J5hL_aem_pQ60T5INrewax5Ev0h-Hmw.
- Damareka, Muhammad D., and Indira E. Anjani. 2025. "Aspek-Aspek Pelanggaran Israel Terhadap Konvensi Jenewa Dalam Konflik Israel-Palestina." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3 (Juni): 499-506. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/viewFile/1684/1827>.
- Delanova, Mariane O. 2017. "POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA PADA MASA PEMERINTAHAN PRESIDEN JOKO WIDODO MELALUI PENGUATAN DIPLOMASI EKONOMI." *Dinamika Global* 2 (Desember): 154-172. <https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-dinamika-global/article/download/40/27/>.
- Dhaysane, Mohamed. 2024. "African Union welcomes ICJ order to prevent acts of genocide in Gaza." <https://aa.com.tr/en/africa/african-union-welcomes-icj-order-to-prevent-acts-of-genocide-in-gaza/3120890>.
- DiLorenzo, Matthew D. 2011. "Nationalism, the anti-conquest norm, and Lockean cultures of anarchy." *University of New Hampshire*. <https://scholars.unh.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1148&context=thesis>.
- DIRCO. 2025. "South Africa condemns Israel's refusal to allow aid into Gaza and its ongoing military operations in the West Bank." DIRCO. <https://dirco.gov.za/south-africa-condemns-israels-refusal-to-allow-aid-into-gaza-and-its-ongoing-military-operations-in-the-west-bank/>.
- Djohan, Yoanita H. 2025. "Jumlah korban tewas Gaza melewati 70 ribu jiwa." *antarajatim*. <https://jatim.antaranews.com/berita/1012573/jumlah-korban-tewas-gaza-melewati-70-ribu-jiwa>.
- Eghbariah, Rabea. 2024. "TOWARD NAKBA AS A LEGAL CONCEPT." *COLUMBIA LAW REVIEW* 4 (may). <https://columbialawreview.org/wp-content/uploads/2024/06/May-2024-1-Eghbariah.pdf>.

- Fadhil, Haris. 2025. "46.913 Warga Gaza Tewas Akibat Serangan Israel Sejak 7 Oktober 2023." *detikNews*, January 19, 2025. <https://news.detik.com/internasional/d-7739943/46-913-warga-gaza-tewas-akibat-serangan-israel-sejak-7-oktober-2023>.
- Fakih, Lama. 2023. "Is Israel's Treatment of Palestinians Comparable to Apartheid?" *humanrightswatch*. <https://www.hrw.org/id/news/2023/12/17/does-israels-treatment-palestinians-rise-level-apartheid>.
- Fathia, Fifi, Mutiara N. Dalimunthe, Muhammad F. Zikri, Nadia Silvia, Silfira E. Putri, and Ramadhan S. Lubis. 2025. "Sejarah Tanah Terjanji dalam Al-Qur'an: Sejarah Panjang Konflik IsraelPalestina dan Dampaknya terhadap Kehidupan Masyarakat Dunia." *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara* 2 (November).
- Galingging, Ridarson, and Irfan Hutagalung. 2026. "THE SIGNIFICANCE OF SOUTH AFRICA'S GENOCIDE CASE AGAINST ISRAEL AT THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE." (februari). <https://revista.domhelder.edu.br/index.php/veredas/article/view/3758/27009>.
- Gencturk, Ahmet. 2025. "Kuba bergabung dengan Afrika Selatan gugat Israel di ICJ atas genosida di Gaza." <https://www.aa.com.tr/id/dunia/kuba-bergabung-dengan-afrika-selatan-gugat-israel-di-icj-atas-genosida-di-gaza/3449632>.
- Hanum, Zubaedah. 2023. "Afrika Selatan Tarik Semua Diplomat dari Israel." *MEDIA INDONESIA*, November, 2023. <https://mediaindonesia.com/internasional/627540/afrika-selatan-tarik-semua-diplomat-dari-israel>.
- Harnisch, Sebastian. 2010. "ROLE THEORY: OPERATIONALIZATION OF KEY CONCEPTS." *HeidelbergUniversity*. <https://www.semanticscholar.org/paper/Role-theory%3A-operationalization-of-key-concepts%3A-Harnisch/fc4f5bcf3ce68c93269bc5170c1f960203f870bd>.
- Harnisch, Sebastian, Cornelia Frank, and Hanns W. Maull, eds. 2011. *Role Theory in International Relations: Approaches and Analyses*. N.p.: Routledge. <https://www.routledge.com/Role-Theory-in-International-Relations/Harnisch-Frank-Maull/p/book/9780415830218>.
- Harnisch, Sebastian, Cornelia Frank, and Hanns W. Maull, eds. 2012. *Role Theory in International Relations: Approaches and Analyses*. N.p.: Routledge. <https://www.semanticscholar.org/paper/Role-theory%3A>

- operationalization-of-key-concepts%3A-Harnisch/fc4f5bcf3ce68c93269bc5170c1f960203f870bd.
- Hasan, Mehdi. 2025. "The US is complicit in genocide. Let's stop pretending otherwise | Mehdi Hasan." *The Guardian*.
<https://www.theguardian.com/commentisfree/2025/aug/02/the-us-complicit-genocide-israel-gaza>.
- Hassanah, Hetty. 2017. "KEJAHATAN GENOSIDA DALAM KETENTUAN HUKUM NASIONAL SEBAGAI KEJAHATAN TRADISIONAL." *Fakultas Hukum Universitas Komputer Bandung* 1 (Oktober).
<https://doi.org/10.56338/mlj.v1i2.75>.
- Hernawan, Gatot. 2019. "Analisis Bergabungnya Afrika Selatan dalam Kerjasama BRICKS (Brasil,Rusia, India,China, dan Afrika Selatan)." <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/171502/1/Gatot%20Hernawan.pdf>.
- Heryansyah, Tedy R. 2026. "Perjalanan Politik Apartheid di Afrika Selatan | Sejarah Kelas 12." *Ruangguru*.
<https://www.ruangguru.com/blog/perjalanan-politik-apartheid-di-afrika-selatan..>
- Hornby, A.S. 2005. *Oxford Advanced Learners Dictionary*. 7th ed.
<https://archive.org/details/oxford-advanced-learners-dictionary-z-lib.org/mode/1up>.
- Huber, Daniela. 2024. "Israel/Palestine and the Normative Power of the "Global South." 1-9.
<https://www.iai.it/it/pubblicazioni/c05/israelpalestine-and-normative-power-global-south>.
- IHL Centre. 2024. "The ICJ's Third Order on Provisional Measures in the South Africa v. Israel Case." International Humanitarian Law Centre 2026. <https://www.diakonia.se/ihl/news/the-icjs-third-order-on-provisional-measures-in-the-south-africa-v-israel-case/>.
- Ilahi, Muhammad A., Mas P. Jnuarsyah, and Dasuki. 2024. "PERAN INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE (ICJ) DALAM PENYELESAIAN KONFLIK ISRAELPALESTINA." *Jurnal Ilmiah Civis* XIII (Juli).
<http://journal.upgris.ac.id/index.php/civis/article/view/19600/0>.
- IMEU. 2005. "INSTITUTE FOR MIDDLE EAST UNDERSTANDING." What Is the "Palestinian Authority"?
<https://imeu.org/resources/resources/what-is-the-palestinian-authority/343>.
- Indonesia Islam Times. 2024. "Standar Ganda dalam Liputan Media Barat tentang Warga Sipil "Israel" dengan Muslim, Palestina, dan Lebanon."

<https://www.islamtimes.com/id/article/1162569/standar-ganda-dalam-liputan-media-barat-tentang-warga-sipil-israel-dengan-muslim-palestina-dan-lebanon>.

The Institute for Middle East Understanding (IMEU). 2021. "Explainer: The Palestinian Authority." <https://imeu.org/resources/palestine-101/explainer-the-palestinian-authority/153>.

International Court of Justice. 2023. "Legal Consequences arising from the Policies and Practices of Israel in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem." <https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/186/186-20230725-wri-23-00-en.pdf>.

International Court of Justice. 2024. "APPLICATION OF THE CONVENTION ON THE PREVENTION AND PUNISHMENT OF THE CRIME OF GENOCIDE IN THE GAZA STRIP (SOUTH AFRICA V. ISRAEL)." <https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/192/192-20240212-wri-01-00-en.pdf>.

International Court Of Justice. n.d. How the Court Works | INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE. Accessed April 4, 2026. <https://icj-cij.org/how-the-court-works?>

Jazairi, Lara E. 2017. "The Occupied Palestinian Territory Challenges to Progressive Realisation from II - Access to Water and Sanitation." (september). <https://www.cambridge.org/core/books/abs/human-right-to-water/occupied-palestinian-territory/2809BC979D72D080726308CAF0A8AABA>.

Jeenah, Na'eem. 2024. "DEMOCRATIC SOUTH AFRICA'S RELATIONS WITH ISRAEL AND PALESTINE." *MISTRA Senior Researcher: Humanity*, (Maret). https://www.academia.edu/download/118071119/BRIEFING_PAPER_South_Africas_relations_with_Israel_and_Palestine_FINAL_March_2024.pdf.

Jeenah, Naeem, Jonathan Fenton, and Saleh Salem. 2024. "Explainer: How S. Africa, Palestinian struggles are linked." The New Arab. <https://www.newarab.com/news/explainer-how-s-africa-palestinian-struggles-are-linked>.

Karim, Moch F. 2022. "Role conflict in International Relations: the case of Indonesia's regional and global engagements." 1-21. <https://doi.org/10.1177/00471178211073880>.

Khan, Salsabila R. 2024. "KEPENTINGAN AFRIKA SELATAN DALAM GUGATAN PELANGGARAN KONVENSI GENOSIDA PADA

KONFLIK ISRAEL-PALESTINA 2023-2024.” *PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH* JAKARTA.

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/85316/1/SALSABILA%20RATU%20BUANA%20KHAN.FISIP.pdf>.

Malaymail. 2024. “Foreign Ministry: Malaysia reaffirms support for South Africa’s legal action against Israel.” <https://www.malaymail.com/news/malaysia/2024/01/12/foreign-ministry-malaysia-reaffirms-support-for-south-africas-legal-action-against-israel/112099>.

Margareth, Fitri K. 2017. “Identitas dalam Hubungan Internasional: Dilema Kebijakan Luar Negeri Finlandia Dalam Krisis Ukraina 2014.” *Journal of International Relations* 3:1-10. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/download/17537/16786>.

Marisa, Wiwin, Sherly Meliana, and Habib Praditya. 2025. “<https://www.voaindonesia.com/a/sidang-pertama-icj-afsel-ini-genosida-yang-disiarkan-langsung/7437071.html>.” 3 (desember). <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/2538/2727>.

McKenna, Amy. 2026. “Apartheid | South Africa, Laws, Definition, Facts, History, Beginning, & End.” *Britannica*, March 6, 2026. <https://www.britannica.com/topic/apartheid>.

McRae, Matthew. 2018. “The story of Nelson Mandela | CMHR.” Canadian Museum for Human Rights. <https://humanrights.ca/story/story-nelson-mandela>.

Mengshu, Zhan. 2020. “A Brief Overview of Alexander Wendt's Constructivism.” (May). <https://www.e-ir.info/2020/05/19/a-brief-overview-of-alexander-wendts-constructivism/#:~:text=Through%20the%20mechanism%20of%20interaction,other%20at%20the%20status%20quo>.

Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. 2024. “Statement by Minister Albares: proceedings of the International Court of Justice on Gaza.” https://www.exteriores.gob.es/en/Comunicacion/Noticias/Paginas/Noticias/20240606_MINISTERIO06.aspx.

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS GOVERNMENT OF PAKISTAN. 2024. “Pakistan's support for the application by South Africa at ICJ concerning Israel’s violations of the Genocide Convention.”

- <https://mofa.gov.pk/press-releases/pakistans-support-for-the-application-by-south-africa-at-icj-against-israel-concerning-the-genocide-convention>.
- Morgan, Dr. Ingrid R. 2024. "South Africa's Deeper Motives in Bringing the South Africa v Israel Case." Human Rights in Context. <https://www.humanrightsincontext.be/post/south-africa-s-deeper-motives-in-bringing-the-south-africa-v-israel-case>.
- Mosquera, Carlos C. 2025. "These Global South Countries Barred Arms Transfers to Israel." <https://jacobin.com/2025/07/global-south-israel-palestine-bogota>.
- Mugabi, Isaac. 2025. "African countries seek increased influence at UNGA." DW. <https://www.dw.com/en/african-countries-seek-increased-influence-at-unga/a-74109927>.
- Nanda, Shofiyyah S. 2024. "ANALISIS PENERAPAN "ASEAN WAY" OLEH INDONESIA TERHADAP PENYELESAIAN KONFLIK MYANMAR." *DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS HASANUDDIN*. https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/35027/2/E061191083_skripsi_04-04-2024%201-2.pdf.
- Naza Thorik.M.R, and mUKLIS Raditya. 2024. "ANALISIS KASUS GENOSIDA ISRAEL TERHADAP PALESTINA." *Jurnal Kajian Ilmiah Interdisiplinier*, (februari). <https://sejurnal.com/pub/index.php/jkii/article/view/577/668>.
- Nene, Ntuthuzelo. 2026. "Ramaphosa presents views on peace and security in Africa at AU summit." EWN. <https://www.ewn.co.za/2026/02/14/ramaphosa-presents-views-on-peace-and-security-in-africa-at-au-summit>.
- Non Alignment Movement. 2024. "19th Summit of Heads of State and Government of the Non-Aligned Movement." http://cns.miis.edu/nam/documents/Official_Document/Kampala_Final_Outcome_Document.pdf.
- Nursanty, Lina. 2025. "AS Kembali Veto Resolusi DK PBB soal Gencatan Senjata di Gaza untuk Keenam Kalinya." THE STRATEGY. <https://www.isds.co.id/2025/09/20/as-kembali-veto-resolusi-dk-pbb-soal-gencatan-senjata-di-gaza-untuk-keenam-kalinya/>.
- O'Brien, Madya M. 2025. "Why are the ICJ and ICC cases on Israel and Gaza taking so long?" University of Western Australia.

- <https://www.uwa.edu.au/news/article/2025/october/why-are-the-icj-and-icc-cases-on-israel-and-gaza-taking-so-long>.
- O'Regan, Victoria. 2026. "US intervenes to defend Israel in SA's ICJ genocide case." *Daily Maverick*. <https://www.dailymaverick.co.za/article/2026-03-13-pressure-mounts-as-netherlands-iceland-intervene-in-sas-genocide-case-against-israel/>.
- Palestinian Academic Society for the Study of International Affairs, Jerusalem. 2023. "THE NAKBA: 75 YEARS ON." https://palestine.fes.de/fileadmin/user_upload/Publication_1/PASSIA/PASSIA_2023/Nakba_PASSIA_Bulletins23.pdf.
- Planasari, Sita. 2025. "Universitas Columbia Keluarkan Hampir 80 Mahasiswa karena Protes Gaza." *tempo*. <https://www.tempo.co/internasional/universitas-columbia-keluarkan-hampir-80-mahasiswa-karena-protas-gaza-2049858>.
- Pontarelli, Francesco. 2024. "Rooted in Resistance: Historical Perspectives on South Africa–Palestine Solidarity – a Conversation with Professor Salim Vally." *Notebooks: The Journal for Studies on Power* 4:129-141. <https://click.endnote.com/viewer?doi=10.1163%2F26667185-bja10060&token=WzQ2MTM5MTYsIjEwLjExNjMvMjY2NjcxODUtYmphMTAwNjAiXQ.6L9iFvBxL0Q-nqc54lmfZQeUyDE>.
- Prasetyo, Mujiono H. 2020. "Kejahatan Genosida Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional." *Jurnal Gema Keadilan* 7 (Oktober). <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/9075/4630>.
- Putri, Karunia. 2024. "Afrika Selatan Ajukan Kasus Genosida Israel di Gaza ke ICJ, Ini Bukti-buktinya | tempo.co." *Tempo.co*, October 31, 2024. <https://www.tempo.co/internasional/afrika-selatan-ajukan-kasus-genosida-israel-di-gaza-ke-icj-ini-bukti-buktinya-1162058>.
- Qabaha, Ahmad, and Bilal Hamamra. 2021. "The Nakba Continues: The Palestinian Crisis from the Past to the Present." *Memorial University of Newfoundland* 1. https://www.researchgate.net/publication/353852465_The_Nakba_Continues_The_Palestinian_Crisis_from_the_Past_to_the_Present.
- Ramaphosa, Cyril. 2024. "From the Desk of the President." South African Government. <https://www.gov.za/blog/desk-president-140>.
- Ramaphosa, Cyril. 2025. "President Cyril Ramaphosa: High-Level on Two-State Solution." <https://www.gov.za/news/speeches/president-cyril-ramaphosa-high-level-two-state-solution-22-sep-2025>.
- Rani. 2024. "Konvensi Genosida: Sejarah dan Tujuan Pembentukannya." *SEDIKSI*. <https://sediksi.com/konvensi-genosida/>.

- Rusmayani, Elsa. n.d. "ANALISIS PERAN GERAKAN BOYCOTT, DIVESTMENT, SANCTIONS (BDS) DALAM MENDUKUNG PERJUANGAN PALESTINA TERHADAP PENDUDUKAN ISRAEL." *Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram, Kota Mataram, NTB, Indonesia*. [https://eprints.unram.ac.id/51685/2/JURNAL%20ELSA%20RUSMA YANI.pdf](https://eprints.unram.ac.id/51685/2/JURNAL%20ELSA%20RUSMA%20YANI.pdf).
- Sagoo, Rashmin. 2024. "South Africa's genocide case against Israel: The International Court of Justice explained." Chatham House. <https://www.chathamhouse.org/2024/01/south-africas-genocide-case-against-israel-international-court-justice-explained>.
- Sanchez, Pedro. 2024. "Institutional declaration by the President of the Government of Spain on the recognition of the State of Palestine." <https://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/presidente/news/paginas/2024/20240528-declaration-palestine.aspx>.
- Senyuk, Yuliya. 2018. "THE CULTURES OF ANARCHY OF THE INTERNATIONAL SYSTEM AND THEIR INFLUENCE ON EUROPEAN INTEGRATION PROCESSES." 5 (1). <https://eppd13.cz/wp-content/uploads/2018/2018-5-1/09.pdf>.
- Setiawan NH PhD, Dodik. 2024. "Analisis Mendesak Israel." Kedaulatan Rakyat. <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/47078/Analisis%20Mendesak%20Israel-Dodik%20Setiawan%20Nur%20Heriyanto,%20S.H.,%20M.H.,%20L.L.M.,%20Ph.D.pdf?sequence=1>.
- Shoba, Muzi S. 2018. "South Africa's Foreign Policy Position in BRICS." 7 (april). <https://www.jstor.org/stable/26889980?refreqid=fastly-default%3Ac362358d04b945317e9381ac94d3d200&seq=1>.
- Sidiqqa, Arhama. 2024. "A PANORAMIC VIEW OF SOUTH AFRICA'S CASE AT THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE." *INSTITUTE OF STRATEGIC STUDIES ISLAMABAD*, (Januari). https://issi.org.pk/wp-content/uploads/2024/01/IB_Arhama_Jan_19_2024.pdf.
- Skoczylas, Paul. 2000. "Review of Social Theory of International Politics by Alexander Wendt." *Online Journal for Peace and Conflict Resolution*. [https://ciaotest.cc.columbia.edu/olj/ojpcr/ojpcr_3_2/ojpcr_3_2e.html#:~:text=258\)%20In%20a%20Hobbesian%20culture%2C%20adversaries%20observe,culture%2C%20will%20refrain%20from%20killing%20each%20other](https://ciaotest.cc.columbia.edu/olj/ojpcr/ojpcr_3_2/ojpcr_3_2e.html#:~:text=258)%20In%20a%20Hobbesian%20culture%2C%20adversaries%20observe,culture%2C%20will%20refrain%20from%20killing%20each%20other).

- South Africa Government News Agency. 2024. "South Africa bears 'moral duty to act' against genocide." <https://www.sanews.gov.za/south-africa/south-africa-bears-moral-duty-act-against-genocide>.
- South African Government. 2023. <https://www.gov.za/news/speeches/president-cyril-ramaphosa-extraordinary-joint-meeting-brics-leaders-and-leaders>.
- South African Government. n.d. "quotes." <https://www.gov.za/www.gov.za/mandela100/quotes>.
- South African Government News Agency. 2026. "President Ramaphosa delivers assessment on African security challenges." https://www.sanews.gov.za/south-africa/president-ramaphosa-delivers-assessment-african-security-challenges?utm_source=chatgpt.com.
- Spara, Matti. 2020. "From Rivalry to Friendship: The European State Systems and the Cultures of Anarchy." <https://www.e-ir.info/2020/09/13/from-rivalry-to-friendship-the-european-state-systems-and-the-cultures-of-anarchy/#:~:text=Wendt's%20key%20claim%20in%20his,members%20of%20the%20Kantian%20culture>.
- Springfield Committee Against Apartheid in South Africa. 1985. "Life Under Apartheid: U.S. Stake in South Africa's Racism." <https://africanactivist.msu.edu/recordFiles/210-849-23826/Springfield6popt.pdf>.
- Suganami, Hidemi. 2002. "On Wendt's philosophy: a critique." *Review of International Studies* 28:23-37. <https://library.fes.de/libalt/journals/swetsfulltext/13053866.pdf>.
- Sulistyo Putri, Nabila M. 2025. "PERAN PBB DALAM MENANGANI KONFLIK ISRAEL-PALESTINA TAHUN 2023." *DIPLOMACY AND GLOBAL SECURITY JOURNAL Jurnal Mahasiswa Magister Hubungan Internasional* 2 (oktober). <https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/DGSJ/article/download/4596/1234>.
- Tant, Emilie, and Yacine A. Larbi. 2024. "Whatever happens now, South-South solidarity with Gaza has already exposed the West." ODI. <https://odi.org/en/insights/whatever-happens-now-southsouth-solidarity-with-gaza-has-already-exposed-the-west/>.
- Teixeira, Lucas B. 2025. "Lula defende Estado da Palestina na ONU e critica Israel por genocídio." UOL Notícias. <https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2025/09/22/lula-onu-palestina-israel-genocidio.htm>.

- Thies, Cameron G. 2010. "Explaining Zones of Negative Peace in Interstate Relations: The Construction of a West African Lockean Culture of Anarchy." *European Journal of International Relations*, (september). https://www.researchgate.net/publication/43763163_Explaining_Zones_of_Negative_Peace_in_Interstate_Relations_The_Construction_of_a_West_African_Lockean_Culture_of_Anarchy#:~:text=Abstract,in%20the%20West%20African%20context.
- Tondo, Lorenzo. 2026. "Gaza war leads to 41% fall in births prompting allegations of reproductive violence." *The Guardian*. https://www.theguardian.com/world/2026/jan/14/gaza-war-fall-in-births-reproductive-violence?utm_source=chatgpt.com.
- Triutama, Reynaldi. 2018. "ANALISIS PERUBAHAN SIKAP KENYA TERHADAP ARMS TRADE TREATY." *Journal of International Relations* 4:841-848. <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1436176&val=4718&title=ANALISIS%20PERUBAHAN%20SIKAP%20KENYA%20TERHADAP%20ARMS%20TRADE%20TREATY>.
- Vijay. 2024. "The Global South Takes Israel to Court: The Third Newsletter (2024)." <https://thetricontinental.org/newsletterissue/south-africa-israel-international-court-of-justice/>.
- VOA Indonesia. 2024. "Sidang Pertama ICJ, Afsel: Ini Genosida yang Disiarkan Langsung." <https://www.voaindonesia.com/a/sidang-pertama-icj-afsel-ini-genosida-yang-disiarkan-langsung/7437071.html>.
- Waisová, Šárka. 2002. *Úvod do studia mezinárodních vztahů*. N.p.: Aleš Čeněk.
- Wehner, Leslie E., and Cameron G. Thies. 2021. "Leader Influence in Role Selection Choices: Fulfilling Role Theory's Potential for Foreign Policy Analysis." *International Studies Review* 23. https://watermark02.silverchair.com/viab014.pdf?token=AQECAHi208BE49Ooan9kkhW_Ercy7Dm3ZL_9Cf3qfKA485ysgAAA0swggNH BgkqhkiG9w0BBwagggM4MIIDNAIBADCCAY0GCSqGSIb3DQEHA TAeBgIghkgBZQMEAS4wEQQMzltMjvRpWMGLo59hAgEQgiIC_v5iBOXzDmTbsJ9nUf-2FTyAFBB0AhYH7nRDnJjWykSrzw.
- Wildan, Muhammad A. n.d. *Modul Metode Penelitian*. https://www.google.co.id/books/edition/Modul_Metode_Penelitian/WH0vEQAAQBAJ?hl=en&gbpv=0.
- Zahro, Putri M. 2025. "Kasus Genosida oleh Afrika Selatan Terhadap Israel di ICJ." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik* 5:4391-4398. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i5>.